



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

#2024  
KKP BEYOND



# LAPORAN KINERJA

## TRIWULAN I 2024

PUSAT RISET PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



# KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Pusat Riset Perikanan Triwulan I Tahun 2024” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja Pusat Riset Perikanan Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik *makro* maupun *mikro* serta langkah-langkah perumusan kebijakan kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan perumusan kebijakan kelautan dan perikanan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan penelitian secara inovatif di masa yang akan datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

Jakarta, **26** April 2024

Kepala Pusat Riset Perikanan



  
Yayan Hikmayani, S.Pi., M.Si.  
NIP. 19671004 199903 2 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
PENDAHULUAN .....	2
Latar Belakang.....	2
Tujuan .....	3
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	4
Keragaan Pegawai.....	9
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2024 .....	12
Potensi dan Permasalahan.....	14
PERENCANAAN KINERJA .....	17
Rencana Strategis.....	17
Rencana Kerja Tahun 2024.....	24
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	25
Pengukuran Kinerja .....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 .....	31
Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	32
Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2024 .....	56
Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya.....	61
PENUTUP .....	65
Kesimpulan.....	65
Permasalahan dan Tindaklanjut.....	65
Penutup.....	66
LAMPIRAN.....	69

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterkaitan visi, misi dan tujuan dalam Renstra BRSDM KP .....	19
Tabel 2 Rencana Kerja Pusrisikan TA 2024 .....	24
Tabel 3 Anggaran unit kerja dilingkup Pusat Riset Perikanan.....	25
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Pusrisikan TA 2024 .....	25
Tabel 5 Bobot validasi IKK.....	27
Tabel 6 Klasifikasi target indikator kinerja.....	29
Tabel 7 Status Capaian Nilai Kinerja .....	29
Tabel 8 Capaian IKK Pusat Riset Perikanan Triwulan I Tahun 2024 .....	32
Tabel 9 Capaian IKK 1–Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah) .....	35
Tabel 10 Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lingkup Pusrisikan .....	36
Tabel 11 Capaian IKK7–Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) .....	43
Tabel 12 Perbandingan IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) dengan Eselon II Lainnya .....	44
Tabel 13 Capaian IKK 8–Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	45
Tabel 14 Data Rekapitulasi persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusrisikan .....	46
Tabel 15 Perbandingan IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya .....	47
Tabel 16 Capaian IKK 12–Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%) .....	53
Tabel 17 Rincian Dokumen Manajemen Internal Pusat Riset Perikanan.....	53
Tabel 18 Perbandingan IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya .....	54
Tabel 19 Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lingkup Pusrisikan (%) .....	56
Tabel 20 Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Triwulan I Tahun 2024 .....	58
Tabel 21 Kronologi Revisi Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2024...	62

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Pie Jumlah Pegawai Lingkup Pusrisikan .....	9
Gambar 2 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Lingkup Pusrisikan .....	10
Gambar 3 Diagram Sebaran PNS menurut Tingkat Pendidikan .....	11
Gambar 4 Diagram Sebaran PNS Lingkup Pusrisikan dalam rentang umur..	12
Gambar 5 Diagram perbandingan gender pegawai lingkup Pusriskan .....	12
Gambar 6 Nilai NPSS Pusat Riset Perikanan Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 .....	31
Gambar 7 Perbandingan Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Triwulan I Tahun 2024 .....	44
Gambar 8 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%).....	47
Gambar 9 Perbandingan Capaian Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Triwulan I Tahun 2024 dengan Eselon II Lainnya .....	54

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**P**usat Riset Perikanan (Pusriskan) merupakan unit Es.2 yang memiliki fungsi penyusunan kebijakan teknis rencana dan program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan. Pusriskan dalam upaya untuk meningkatkan pencapaian pembangunan perikanan melalui peningkatan akuntabilitas kinerjanya. sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, pada akhirnya diterapkan pada sasaran strategis dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021-2024 yang ditetapkan melalui ketentuan pada Nomor 180/PER-BRSDM/2021 tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021-2024 Sebagai Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/PER-BRSDM/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021-2024, yang diikuti dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Tahunan secara konsisten, terus menerus, dan berkesinambungan.

Pusriskan telah menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam Tahun 2024. Satu sasaran kegiatan tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan (IKK). Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari satu sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2024 ini tercapai dengan baik dalam pencapaian progres kegiatan. Hasil Pengukuran capaian kinerja Pusriskan dengan menggunakan aplikasi

*kinerjaku.kkp.go.id* Triwulan I Tahun 2024 menunjukkan capaian Pusrisikan berwarna Biru atau Istimewa dengan nilai **114,50%**.

Pengukuran tersebut diperoleh dari hasil capaian Pusrisikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, dengan terukurnya 4 (empat) indikator kinerja Pusrisikan yang ditargetkan pada Triwulan ini sebagai berikut :

1. IKK 1–Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan tercapai sebanyak Rp.823.310.723,00 atau 120,00% dari target Rp.293.500.639,00;
2. IKK 7–Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar tercapai sebesar 108,33% atau 115,24% dari target 94%;
3. IKK 8–Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Perikanan tercapai sebesar 100,00% atau 120,00% dari target 82%;
4. IKK 12–Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%) tercapai sebesar 100,00% atau 100,00% dari target 100,00%.

Selanjutnya tingkat pencapaian kinerja secara umum Triwulan I Tahun 2024 sebesar 114,50% dipandang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 sebesar 105,95%.

Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Pusrisikan TA 2024 cukup baik yaitu mencapai Rp.24.179.054.127 atau 18,75% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.128.950.000.000.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Pusat Riset Perikanan Tahun 2024 dicapai dengan baik, yang persentasenya digambarkan mengalami kenaikan pada perkembangan fisik kegiatan dari masing-masing Sasaran Kegiatan di setiap periode waktu baik bulanan maupun triwulanan. Dalam proses pencapaian kinerjanya, sampai dengan Triwulan I secara keseluruhan telah tercapai dengan baik tanpa ada permasalahan. Untuk selanjutnya, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan pada triwulan berikutnya yang memiliki

tantangan berbeda sehubungan dengan terbitnya Struktur Organisasi dan Tata Kelola yang baru. Perubahan Perjanjian Kinerja, IKK dan target Pusat Penyuluhan KP menjadi ekspektasi dan atau obsesi besar pada Triwulan II Tahun 2024 ini, terutama Sasaran Kinerja dan IKK substantif yang terkait penyuluhan kelautan dan perikanan.

Merujuk pada Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 diatas Pusrisikan mengalami perubahan organisasi dalam struktur BPPSDM KP menjadi Pusluh KP. Pada masa transisi untuk pengukuran pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini masih mengacu pelaksanaan kegiatan dan capaian perjanjian kinerja pada Pusrisikan seusi Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020. Namun, juga telah dilakukan persiapan menghadapi tantangan baru dengan telah di terbitkannya kelompok kerja teknis di Pusluh KP.



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

#2024  
KKP BEYOND



# PENDAHULUAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan Perikanan sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan terbesar bagi pembangunan nasional secara langsung dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dalam mewujudkan kemandirian ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, harus diakui bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perikanan sehubungan dengan dinamika lingkungan strategis domestik dan global, antara lain berkaitan dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk, kemiskinan, kebutuhan energi, ketahanan pangan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Keadaan ini semakin bertambah berat dengan adanya tantangan persaingan yang semakin ketat berkaitan dengan bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0.

Permasalahan dan tantangan tersebut perlu segera diatasi, baik melalui inovasi teknologi maupun kebijakan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan berbagai temuan yang tepat guna, inovasi baru dan juga teknologi yang inovatif dari lembaga riset perikanan secara terus menerus dan berkelanjutan, agar dapat merespon permasalahan dan tantangan guna menguatkan struktur perekonomian ataupun daya saing usaha di bidang perikanan secara aman dan bijaksana.

Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) sebagai lembaga riset di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, serta teknologi alat dan mesin perikanan diharapkan dapat menjadi pusat inovasi teknologi perikanan yang handal untuk mewujudkan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025 “Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan

Nasional. Selain itu, dukungan IPTEK yang kuat di era revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan sebagai keunggulan komparatif menuju peningkatan produksi, industrialisasi ataupun ekspor. Pada saat yang sama, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk Hak Paten semakin menjadi kecenderungan di dunia global, sehingga sangat mendesak bagi bangsa Indonesia untuk merebut keunggulan IPTEK melalui usaha-usaha mandiri.

Sesuai dengan perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). Dengan paradigma baru ini, orientasi kerja Pusat Riset Perikanan adalah menciptakan paket teknologi yang inovatif dalam sistem produksi perikanan, menjadikan iptek sebagai dasar pengembangan usaha perikanan di masyarakat/pengguna yang kompetitif dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta sinergi kegiatan riset yang berdaya saing. Untuk itu, kegiatan riset harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna (*user oriented*), tanpa mengabaikan pengembangan teknologi yang bersifat *demand driving*, sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem kelembagaan perikanan yang dihasilkan lebih tepat guna (spesifik lokasi dan pemakai) dan dapat sekaligus futuristik. Riset harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan calon pengguna outputnya sehingga output cepat menjadi *outcome* yang tepat sasaran dan tepat cara agar berdampak dalam percepatan pengembangan.

## Tujuan

Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Negara telah menetapkan target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut kemudian disusun dalam Laporan Kinerja Pusriskan sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan

penyusunan Laporan Kinerja Pusrisikan Triwulan I Tahun 2024 ini, yaitu :

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Riset Perikanan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Riset Perikanan pada Triwulan I Tahun 2024 dalam upaya memperbaiki kinerja selanjutnya; dan
3. sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

## Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pusat Riset Perikanan (Pusrisikan) yang sebelumnya memiliki nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Puslitbangkan), merupakan penggabungan dua nomenklatur yang berbeda, yakni Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI) serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya (P4B), dibentuk dan ditugaskan untuk melaksanakan riset dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pemulihan sumber daya ikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.1/MEN/2001 tanggal 02 Januari 2001, Peraturan Menteri DKP Nomor. 07/PER/MEN/2005 tanggal 24 Juni 2005.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, susunan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas a. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; b. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; c. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; d. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan; dan e. kelompok jabatan fungsional.

Merujuk pada Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 diatas Pusat Riset Perikanan mengalami perubahan organisasi dalam struktur Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menjadi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan kelompok kerja yang baru. Namun dalam masa transisi untuk pengukuran pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini masih mengacu palaksanaan kegiatan dan capaian perjanjian kinerja pada Pusat Riset Perikanan sesuai Struktur Organisasi yang lama berdasarkan Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020. Pusat Riset Perikanan mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas dalam melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusriskan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
2. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
3. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset perikanan; dan
4. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada Pusat Riset Perikanan. Sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pusat Riset Perikanan nomor B.789/BRSDM.3/KP.444/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang telah dilakukan revisi menjadi Surat Tugas Kepala Pusat Riset Perikanan nomor B.1869/BRSDM.3/KP.440/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 menyebutkan bahwa memberi tugas kepada seluruh pegawai Pusat Riset Perikanan untuk 1) menjadi Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja; 2) memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi dengan penuh tanggung jawab; dan 3) menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Pusat Riset Perikanan. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Riset Perikanan, Nomor DIPA-032.01.1.622081/2023, tanggal 30 November 2022. Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Susunan Keanggotaan Tim Kerja Pusat Riset Perikanan terdiri dari 4 (empat) tim kerja antara lain 1. Tim Kerja Program; 2. Tim Kerja Keuangan. 3. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum; 4. Tim Kerja Kemitraan dan Pengelolaan PNBPN. Masing-masing tim kerja memiliki ketua dan anggota dalam melaksanakan fungsinya.

Tim kerja Program memiliki fungsi a. Koordinasi dan penyusunan Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja Pusat Riset Perikanan; b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kinerja Pusat Riset Perikanan; dan c. Koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, program, penganggaran, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyiapan bahan pimpinan. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja seperti Nilai PM SAKIP Pusat Riset Perikanan, Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan, dan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan. Tim kerja program terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 14 (empat

belas) Anggota yang terdiri dari 9 (sembilan) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 (lima) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

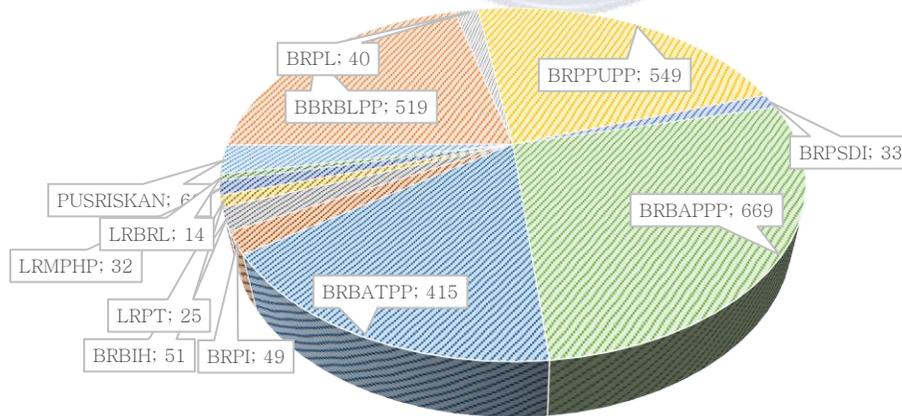
Tim kerja keuangan memiliki fungsi a. Koordinasi dan tindak lanjut penyelesaian terhadap nilai temuan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan; b. Koordinasi dan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan; c. Koordinasi kinerja pengelolaan dan pelaksanaan anggaran lingkup Pusat Riset Perikanan. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja seperti Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Perikanan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Perikanan 2023, Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Pusat Riset Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, dan Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan. Tim kerja keuangan terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 12 (dua belas) Anggota yang terdiri dari 9 (sembilan) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (tiga) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tim kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum memiliki fungsi a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan; b. Koordinasi dan monitoring penerapan system manajemen pengetahuan pada aplikasi manajemen pengetahuan yang ditunjuk; dan c. Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan data, diseminasi dan publikasi, pengelolaan aset dan pengelolaan administrasi SDM Aparatur. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja seperti Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan, Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Pusat Riset Perikanan, dan Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan. Tim kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 33 (tiga puluh tiga) Anggota yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10 (sepuluh) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tim Kerja Kemitraan dan Pengelolaan PNBP memiliki fungsi a. Koordinasi dan pelaksanaan layanan eksternal dalam kemitraan lingkup Pusat Riset Perikanan, termasuk dukungan SFV; dan b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan PNBP Lingkup Pusat Riset Perikanan. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 2 (dua) Indikator Kinerja seperti Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusriskan dan Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan. Tim kerja Kemitraan dan Pengelolaan PNBP terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 11 (sebelas) Anggota yang terdiri dari 8 (delapan) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (tiga) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Pusat Riset Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dibantu oleh unit pelaksana teknis yaitu Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP); Balai Riset Perikanan Laut (BRPL); Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP); Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI); Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP); Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP); Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH); Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI); Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT); Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL); dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP).

## Keragaan Pegawai



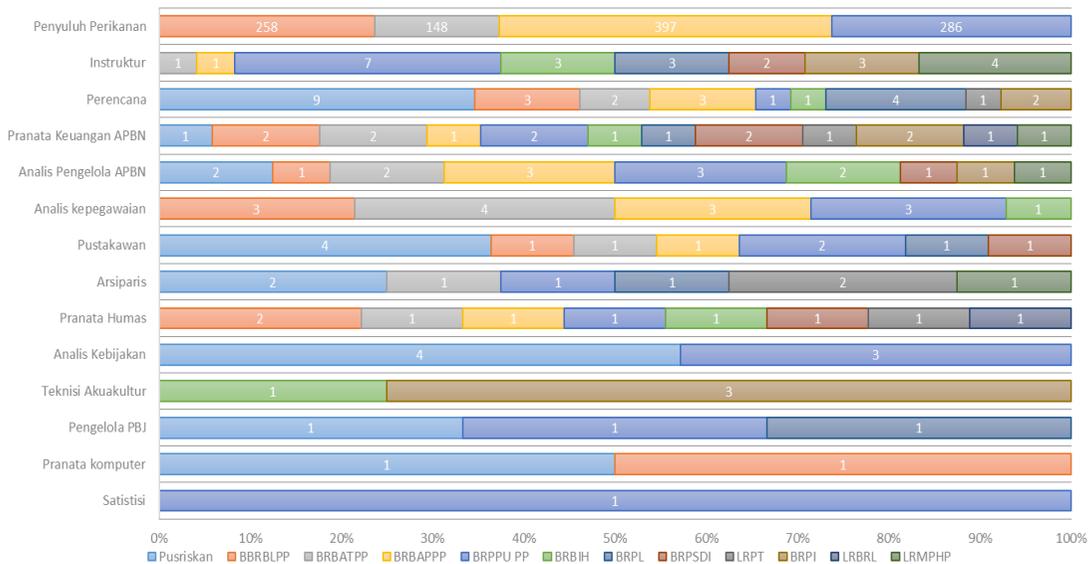
Gambar 1 Diagram Pie Jumlah Pegawai Lingkup Pusriskan  
(Jumlah PNS = 1431 orang; PPPK = 162 orang;  
Tenaga Kontrak = 243 orang; Penyuluh Bantu = 626 orang)

Jika dilihat dari gambar keragaan pegawai, BBRBLPP, BRPBAPP, BRPBATPP dan BRPPUPP merupakan 4 (empat) Satker yang mengemban tugas sebagai Satminkal Penyuluhan disamping tugasnya sebagai satker Riset sehingga mempunyai pegawai penyuluh yang relatif besar dibanding pegawai Riset di satker lain. Jumlah Satker yang mempunyai pegawai paling banyak terdapat pada BRPBAPP, sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit pada LRBRL.

Pegawai Pusriskan sampai dengan Bulan Februari 2024 berjumlah 66 ASN, namun mulai Bulan Maret 2024 terjadi mutasi pegawai Lingkup BPPSDM yang menyesuaikan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024. Adapun sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/MEN-SJ.3/KP.431/II/2024 per tanggal 29 Februari 2024 tentang Permindahan Pegawai Negeri Sipil, sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup BPPSDM dari sebanyak 268 ASN adalah sebagai berikut :

- Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari 92 ASN;
- Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 52 ASN;
- Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan 73 ASN;
- Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan 51 ASN.

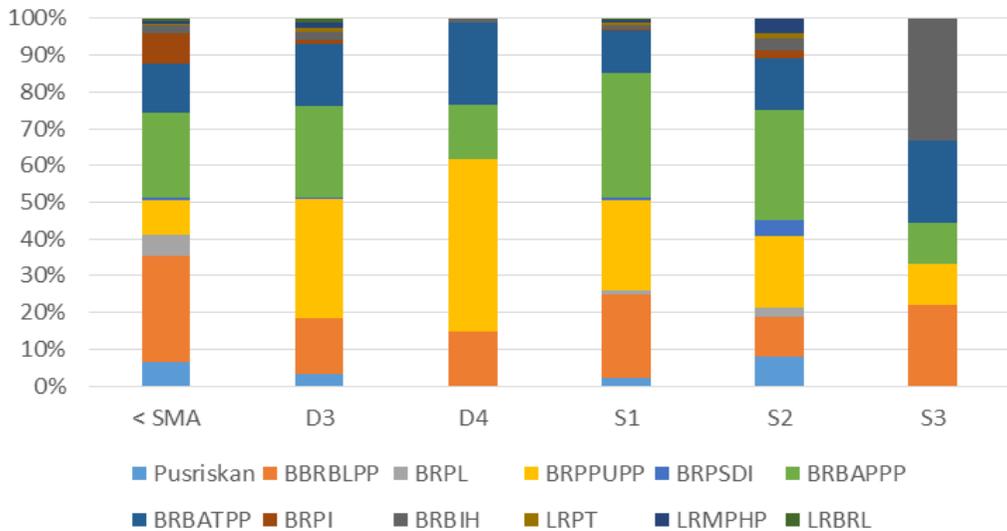
Sebelumnya di lingkup Pusrisikan pegawai fungsional umum yang berpindah jabatan ke JF tertentu sehingga komposisi dan jumlah jabatan fungsional tertentu seperti di Gambar berikut ini:



Gambar 2 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Lingkup Pusrisikan

Dapat dilihat pada Gambar diatas terdapat 14 (empat belas) jabatan fungsional tertentu yang diemban oleh pegawai di lingkup Pusat Riset Perikanan. Dengan jumlah jabatan fungsional terbanyak adalah Penyuluh Perikanan.

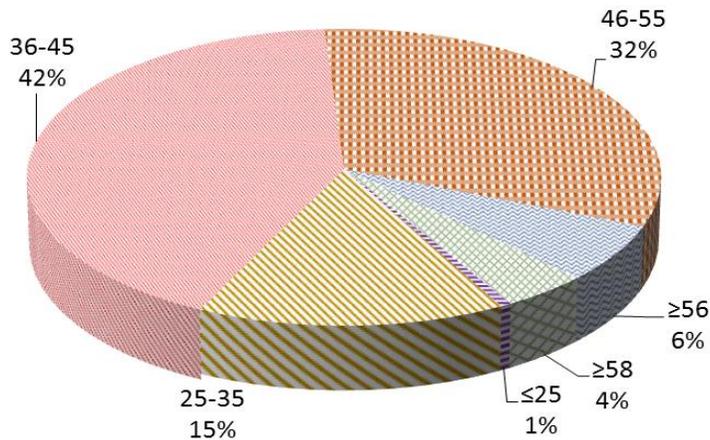
Apabila dilihat dari jenjang pendidikan, dari data per Desember 2023, menurut tingkat pendidikan: S3 sebanyak 9 orang, S2 sebanyak 149 orang, S1 sebanyak 931 orang, D4 sebanyak 102 orang, D3 sebanyak 185 orang, dan ≤ SMA sebanyak 217 orang. Seperti yang dapat dilihat dari Gambar dibawah. Hanya beberapa satuan kerja yang memiliki pegawai dengan tingkat Pendidikan strata 3 atau doctoral, sedangkan masih banyak pegawai di tingkat SLTA sampai dengan D3 atau diploma.



Gambar 3 Diagram Sebaran PNS menurut Tingkat Pendidikan Lingkup Pusriskan

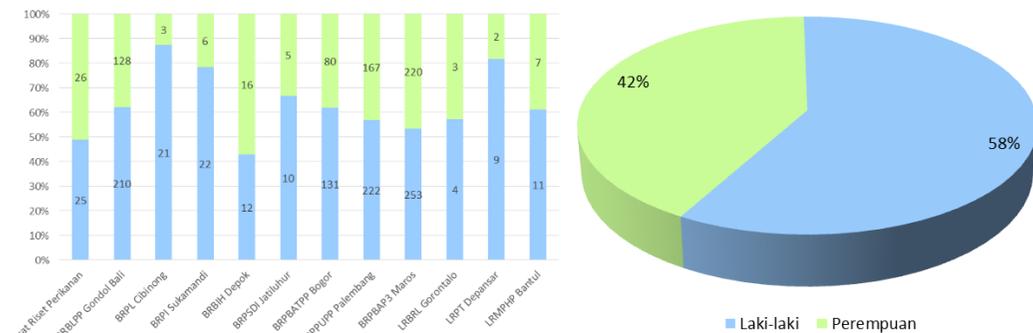
Sebagai upaya dalam meningkatkan jenjang pendidikan pegawai Lingkup Pusriskan maka dilaksanakan tugas belajar bagi ASN Lingkup Pusriskan. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.

Apabila dilihat dari rentang umur pegawai lingkup Pusriskan dapat dilihat bahwa rentang umur dengan jumlah pegawai terbanyak adalah pada rentang umur 36-45 Tahun sebanyak 667 pegawai. Sedangkan rentang umur dengan jumlah pegawai yang paling sedikit adalah rentang umur dibawah 25 Tahun sebanyak 8 pegawai. Sebaran pegawai dengan rentang umur tertentu dapat dilihat pada Gambar dibawah.



Gambar 4 Diagram Sebaran PNS Lingkup Pusriskan dalam rentang umur

Apabila dilihat dari sisi gender, pegawai di lingkup Pusriskan secara umum, proporsi jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Hanya Pusriskan dan BRBIH Depok yang memiliki jumlah pegawai perempuan yang lebih banyak dari pada pegawai laki-laki. Sebaran pegawai berdasarkan gender dapat dilihat pada Gambar dibawah.



Gambar 5 Diagram perbandingan gender pegawai lingkup Pusriskan

## Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2024

Sistem Penyajian Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban yang dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mengenai keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja Tahunan ini berisi pertanggungjawaban kinerja Pusrisikan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*Performance Results*) 2024 sendiri dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2024 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana dan atau penetapan kinerja (komitmen kinerja) yang telah dilakukan akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan membandingkan hasil. Demikian pula akan disajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan selama Tahun berjalan, selain juga melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Dalam mengaitkan dengan anggaran maka, realisasinya akan digunakan untuk membahas perwujudan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BPPSDM seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusrisikan.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusrisikan 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Pusrisikan Tahun 2024 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

## Potensi dan Permasalahan

Kegiatan Pusat Riset Perikanan didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana eks riset yang sebagian besar sudah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). Riset Perikanan memiliki: laboratorium biologi, data, limnologi, dan oseanografi, serta kapal riset (perikanan tangkap); laboratorium basah, biologi, kimia, penyakit, bioteknologi, *multi species hatchery*, *biosecurity hatchery*, pakan, patologi dan kesehatan ikan, nutrisi dan bioteknologi, tanah, air dan biologi, *feed processing*, reproduksi, basah (*hatchery*) dan pakan alami (perikanan budidaya), uji numerik dan uji fisik. Laboratorium tersebut sebagian telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). Selain itu seluruh unit kerja di lingkungan Pusat Riset Perikanan memiliki aset berupa kolam yang sebelumnya merupakan kolam uji riset, saat ini dilakukan optimalisasi aset secara bertahap untuk meningkatkan PNBPN maupun untuk menunjang kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) yang merupakan kegiatan unggulan BPPSDM. Dimana Pusar Riset Perikanan merupakan koordinator SFV khususnya untuk di Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset perikanan untuk mendukung pembangunan KP dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh peneliti di lingkungan BPPSDM melakukan penyesuaian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga akan terjadi transformasi kelembagaan



Pusat dan UPT lingkup BPPSDM dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Pasal 6 “Badan Riset Sumberdaya Manusia (BPPSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Sampai Triwulan IV, KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020.



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

#2024  
KKP BEYOND



# PERENCANAAN KINERJA

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### Rencana Strategis

#### Lingkungan Strategis

BRSDM KP memiliki mandat untuk melaksanakan program riset dan penyiapan sumber daya manusia KP, diantaranya adalah melalui penyelenggaraan riset, pendidikan, dan pelatihan, serta penyuluhan secara terpadu dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mandat tersebut harus diikuti penyusunan rencana strategis yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Hal ini akan mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan sektor KP di Indonesia (khususnya melalui peran riset dan SDM).

Lingkungan strategis ini secara teoritis dapat diartikan sebagai situasi strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan BRSDM KP Tahun 2020-2024. Situasi strategis bersumber dari faktor internal (*Internal Factor Strategic*) dan eksternal (*External Factor Strategic*) yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif wilayah (sektoral, regional, nasional, dan global).

#### Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020–2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BRSDM pada Tahun 2020–2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

### Misi

Misi BRSDM adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

## Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BRSDM KP, maka tujuan yang ingin dicapai selama Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;
4. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan;
5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 1 Keterkaitan visi, misi dan tujuan dalam Renstra BRSDM KP 2020–2024

Visi	Misi	Tujuan
Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong	Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
		2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
	Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
	Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.

Visi	Misi	Tujuan
	Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik

## Sasaran

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari :

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat

SS-2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan

**SS-3 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat**

**SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat**

SS-5 Tatakelola SDKP bertanggung jawab

SS-6 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing

SS-7 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif

**SS-8 Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas**

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM Tahun 2020-2024, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

SP-1 SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

SP-2 SDM KP Peserta Diklat untuk Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)

SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan

SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat

SP-5 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan

**SP-6 Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM**

Sedangkan Pusrisikan sendiri memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran program BPPSDM (SP-6) yang diturunkan dari sasaran strategis KKP (SS-8) yaitu :

**SK-1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

### Reviu Renstra Pusat Riset Perikanan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Pusat Riset Perikanan telah melakukan reviu atas Renstra Pusat Riset Perikanan. Pada Tahun 2021, Pusat Riset Perikanan telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra Pusat Riset Perikanan Nomor 340/BRSDM.3/RC.221/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021. Sedangkan pada Tahun 2022, Pusat Riset Perikanan telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan dan pada Tahun 2023 ini, Pusat Riset Perikanan telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 2 (dua Sasaran Kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan.

Reviu atas perubahan target indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja yang tercantum pada Bab IV Bagian C.1 dokumen Renstra Pusat Riset Perikanan Nomor 340/BRSDM.3/RC.221/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Dasar perubahan target IKK pada Tahun 2022 adalah dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2022, tindak lanjut hasil Rapim KKP, Rencana Kerja BRSDM Tahun 2022, capaian IKU Tahun 2021 dan

usulan pemutakhiran terkait rencana kerja lingkup Pusat Riset Perikanan. Beberapa IKK yang mengalami penyesuaian dan/atau perubahan volume target.

Reviu atas perubahan target indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja yang tercantum pada Bab IV Bagian C.1 dokumen Renstra Pusat Riset Perikanan Nomor 340/BRSDM.3/RC.221/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Dasar perubahan target IKK Tahun 2023 adalah dokumen Keputusan Menteri KP Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2023, tindak lanjut hasil Rapim KKP, Renja BRSDM Tahun 2023, capaian IKU Tahun 2022 dan usulan pemutakhiran terkait rencana kerja lingkup Pusat Riset Perikanan. Beberapa IKK yang mengalami penyesuaian dan/atau perubahan volume target adalah sebagai berikut:

1. IKK yang tidak tercantum dalam Renstra 2020 - 2024, namun tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pusat Riset Perikanan berdasarkan surat Sekretaris Badan nomor B.362/BRSDM.1/RC.610/I/2023 hal : Penyampaian PK BRSDM Tahun 2023 tgl. 16 Januari 2023 adalah :
  - a. Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Milyar)
  - b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Perikanan (NSPK)
  - c. Nilai PM SAKIP Pusat Riset Perikanan (nilai)
  
2. IKK yang tercantum dalam Renstra 2020 - 2024, namun tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pusat Riset Perikanan karena tidak ada kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN adalah:
  - a. Data dan/atau Informasi Hasil Riset Perikanan (Rekomendasi Kebijakan) yang dimanfaatkan (data/kajian)
  - b. Hasil riset perikanan yang dimanfaatkan oleh sektor industri (hasil riset)

- c. Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (paket)
  - d. Rekomendasi hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (paket)
  - e. Rekomendasi potensi sumber daya perikanan yang terpetakan dan berkelanjutan pada 11 WPP (kajian)
  - f. Rekomendasi kebijakan Hasil Riset Perikanan (Paket)
  - g. Data dan/atau informasi Hasil Riset Perikanan (rekomjak)
  - h. Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI (paket)
  - i. Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NRI di Perairan Daratan (WPP NRI PD) (paket)
  - j. Karya tulis ilmiah riset perikanan yang dipublikasikan (dokumen)
  - k. Produk biologi hasil riset perikanan (produk)
  - l. Penerapan teknologi adaptif lokasi hasil riset perikanan (paket)
  - m. Teknologi Hasil Riset Perikanan (produk)
  - n. Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan (paket)
  - o. Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan siap Guna (paket)
  - p. Sarana dan prasarana riset perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (paket)
  - q. Sertifikasi kelembagaan riset perikanan (lembaga)
  - r. Unit Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan yang lolos penilaian menuju WBK
  - s. Unit Kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pusat Riset Perikanan (unit)
3. Perubahan volume target IKK Tahun 2023 pada rencana strategis antara lain :
- a. Jejaring dan/atau Kerjasama riset Perikanan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (kesepakatan) semula 50 menjadi 19.
  - b. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup Pusat Riset Perikanan (%) semula  $\leq 1$  menjadi  $\leq 0.5$
  - c. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan (indeks) semula 75 menjadi 78

- d. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (nilai), semula 80,25 menjadi 91
- e. Persentase Unit kerja Lingkup Pusat Riset Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar semula 86 menjadi 92
- f. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Pusat Riset Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) semula 70 menjadi 74
- g. Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan (nilai) semula 90 menjadi 89
- h. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai) semula 88 menjadi 82

## Rencana Kerja Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, mision, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Pusrisikan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2 Rencana Kerja Pusrisikan TA 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	128.950.000
<b>Total Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2024</b>		<b>128.950.000</b>
<b>Tanggal Pengesahan</b>		<b>27 Desember 2023</b>

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Pusrisikan dengan Kepala BPPSDMKP. Penetapan kinerja Pusrisikan Tahun 2024 atau Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran dan target indikator kinerja kegiatan (IKK). IKK tersebut merupakan salah satu Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program dari indikator tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan (2378) yang terdapat pada seluruh unit kerja dilingkup Pusat Riset Perikanan dengan rincian anggaran antara lain.

Tabel 3 Anggaran unit kerja dilingkup Pusat Riset Perikanan

NO	SATKER	PAGU (Rp.) Awal
1	Pusriskan, Ancol	15.245.277.000
2	BRPL, Ancol	15.647.102.000
3	BRPPU-PP, Palembang	15.776.627.000
4	BRPSDI, Jatiluhur	17.412.456.000
5	BBRBL-PP, Gondol	14.458.604.000
6	BRPBAP-PP, Maros	11.729.974.000
7	BRPBAT-PP, Bogor	10.857.446.000
8	BRBIH, Depok	6.954.877.000
9	BRPI, Sukamandi	5.990.158.000
10	LRPT, Bena	6.612.506.000
11	LRBRL, Gorontalo	4.581.931.000
12	LRMPHP, Bantul	3.683.042.000
<b>TOTAL</b>		<b>128.950.000.000</b>

## Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Pusriskan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Pusriskan dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Keseluruhan IKK Pusriskan pada Tahun 2024 untuk semua SK berjumlah 12 (dua belas) IKK. Sebagai alat ukur pencapaian SK, target 12 (dua belas) IKK Pusriskan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Pusriskan TA 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET Awal
1	Terpenuhinya Layanan	1	Nilai PNBSP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah)	2.894.071.000

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET Awal
Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT Lingkup Pusat Riset Perikanan (Orang)	192	
	3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)	≤0,5	
	4	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	82	
	5	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	80	
	6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	94	
	7	Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	82	
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93,76	
	10	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82	
	11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	36	
	12	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100	

## Pengukuran Kinerja

Nilai kinerja adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK. Status capaian yang ditunjukkan dengan pewarnaan ditentukan dari perbandingan antara capaian dengan target. Untuk menghitung nilai kinerja perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK dengan sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK, terdiri dari Outcome, Output Kendali Rendah, Output Kendali Tinggi, dengan bobot seperti tabel berikut:

Tabel 5 Bobot validasi IKK

No	Validitas IKU	Bobot
1	Outcome	5
2	Output Kendali Rendah	3
3	Output Kendali Tinggi	2

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Validitas Output Kendali Rendah yaitu yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.
3. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Selanjutnya ditentukan pola perhitungan indikator kinerja. Pola Perhitungan terdiri dari Akumulasi, Rata-rata dan Nilai Posisi Akhir. Setelah ditentukan pola perhitungannya, ditentukan juga metode cascading. Metode Cascading merupakan metode penurunan dari level unit pemilik indikator kinerja tersebut ke level unit dibawahnya, berisi pilihan Adopsi Langsung, Komponen Pembentuk, Lingkup Dipersempit, atau Buat Baru.

1. Adopsi langsung dilihat dari kalimat dan definisi indikator kinerja pada level yang lebih tinggi diadopsi secara penuh oleh level yang lebih rendah. Indikator kinerja yang di-cascading menggunakan metode ini harus memiliki output yang identik/sama pada tiap level.
2. Komponen Pembentuk dilihat dari kalimat dan definisi indikator kinerja unit/satuan di level yang lebih tinggi diturunkan ke lebih dari satu unit dengan kalimat yang berbeda sesuai peran Unit tersebut dalam pencapaian indikator kinerja. Hal ini karena nilai indikator kinerja tersebut dibentuk oleh beberapa Unit di level bawahnya dengan kontribusi yang berbeda-beda. Capaian indikator

kinerja pada Unit/satuan di level yang lebih tinggi merupakan akumulasi dari capaian indikator kinerja pada pada Unit/satuan di level yang lebih rendah.

3. Lingkup dipersempit dilihat dari kalimat dan definisi indikator kinerja Unit/satuan di level yang lebih tinggi diturunkan ke lebih dari satu Unit kerja dengan kalimat yang serupa namun dengan ruang lingkup lebih sempit. Hal ini karena nilai indikator kinerja tersebut dibentuk oleh beberapa unit di level bawahnya dengan metode yang sama namun ruang lingkup sesuai unit kerja yang melaksanakan. Capaian indikator kinerja unit/satuan di level yang lebih tinggi merupakan rata-rata dari capaian indikator kinerja unit/satuan di level yang lebih rendah.
4. Buat baru dilihat dari indikator kinerja yang bukan merupakan turunan dari atasannya, melainkan baru dibentuk di level yang bersangkutan. indikator kinerja dengan metode Buat Baru dapat merupakan indikator kinerja yang berkontribusi secara tidak langsung pencapaian indikator kinerja atasan, merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tugas spesifik dari unit yang bersangkutan yang tidak berkorelasi dengan atasannya, indikator kinerja yang dibentuk karena ada tugas khusus atau mandat (*mandatory*) dari atasannya.

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menepakati standar status kinerja untuk nilai kinerja dengan klasifikasi polarisasi. Polarisasi terdiri dari Maximize, Minimize, atau Stabilize. Maximize yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk. Minimize yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin tinggi semakin buruk. Stabilize yaitu semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Berikut klasifikasi polarisasi yang ditentukan:

Tabel 6 Klasifikasi target indikator kinerja

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	Sangat Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Status capaian nilai kinerja ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 7 Status Capaian Nilai Kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110-120
Baik	Nilai 90-<110
Cukup	Nilai 70-<90
Kurang	Nilai 50-<70
Sangat Kurang	Untuk Nilai <50
Belum Ada Penilaian	



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

#2024  
KKP BEYOND



# AKUNTABILITAS KINERJA

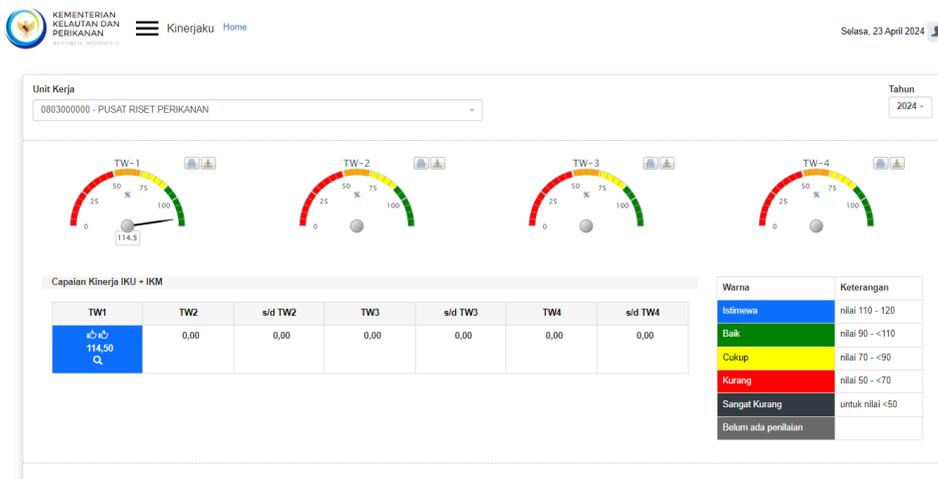
# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Pusriskan mendapatkan mandat untuk melaksanakan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dan mencapai target 12 (dua belasa) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Nilai pencapaian kinerja pada Tahun 2024 dari Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) memiliki kinerja yang baik (di atas target yang telah ditetapkan). Pencapaian terhadap target kinerja Tahun 2024 pada awal Tahun ini walau terdapat Blokir AA terkait kegiatan dukungan manajerial, namun masih dapat melaksanakan kegiatan.

Hasil Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) dengan menggunakan aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* menunjukkan capaian Tahun 2024 berwarna biru dengan nilai 114,50% dalam kategori Istimewa (110-120). Terpenuhinya capaian kinerja juga didukung oleh sataun kerja dibawah Pusat Riset Perikanan dan seluruh pegawai Lingkup Pusriskan dalam memenuhi kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 6 Nilai NPSS Pusat Riset Perikanan Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2024

## Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusriskan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

### Capaian IKK Pusriskan

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusriskan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja Pusriskan Tahun 2024 dapat tercapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8 Capaian IKK Pusat Riset Perikanan Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN	TARGET TW I	CAPAIAN TW I	%
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah)	2.894.071.000	293.256.639	823.310.723	120,00
		2	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT Lingkup Pusat Riset Perikanan (Orang)	192	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN	TARGET TW I	CAPAIAN TW I	%
	3 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)	≤0,5	-	-	-
	4 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	82	-	-	-
	5 Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	80	-	-	-
	6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	94	-	-	-
	7 Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	108,33	115,24
	8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	82	82	100	120,00
	9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93,76	-	-	-
	10 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82	-	-	-
	11 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	36	-	-	-
	12 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100	100	100	100,00

## SASARAN KEGIATAN 1

### Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Sasaran kegiatan Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja. Indikator

kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

### Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) satker dimaksud adalah memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek/Ruang Lingkup PNBP antara lain pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Indikator ini diperoleh dari nilai penerimaan bukan pajak sumber daya alam ditambahkan dengan penerimaan bukan pajak lainnya sehingga diperoleh penerimaan bukan pajak sektor kelautan dan perikanan. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk komponen pembentuk serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan langsung oleh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat penyampaian capaian PNBP dari BPPSDM KP berdasarkan data realisasi pendapatan dari aplikasi OMSPAN per tanggal 10 bulan berikutnya. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 2.894.071.000 (dua miliar delapan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh puluh satu ribu) Rupiah. Capaian IKK Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah Miliar) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 9 Capaian IKK 1–Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah)

IKK 1–Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah)										
Realisasi TW I				Tahun 2024					Renstra Pusrisikan 2020–2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2023–2024	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
-	-	-	1,222	2.894.071.000	293.256.639	823.310.723	120,00	-32,65	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini, IKK Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah) telah tercapai sebesar 823.310.723 (Rupiah) dari target Triwulan I Tahun 2024 sebesar 823.310.723 (Rupiah) atau terealisasi 280,51%, karena pada aplikasi kinerjaku nilai toleransi maksimal adalah 120,00% sehingga persentase capaiannya adalah 120,00%. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada Triwulan I pada Tahun sebelumnya diperoleh penurunan capaian sebesar 32,65% namun belum memiliki target jangka menengah 2020–2024. Penurunan capaian ini dipengaruhi oleh penurunan target di Triwulan I Tahun 2024 terhadap target Triwulan I Tahun 2023. Walaupun demikian capaian pada Triwulan I Tahun 2024 ini masih diatas target capaian yang ditetapkan.

Faktor tercapainya indikator kinerja ini didukung dari optimalisasi lahan eks riset berupa lahan budidaya, laboratorium, gedung bangunan. Sehingga diperolehnya pendapatan dari beberapa penerimaan negara baik penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Selain itu, dengan adanya kontrak kinerja untuk penerimaan PNBP sehingga dapat memacu pendapatan dari setiap satuan kerja. Didukung juga komitmen pimpinan unit kerja dan kesanggupan tim kerja dalam kegiatan dalam mencapai target PNBP.

Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah telah dilakukan pendataan sarana prasarana yang baik lingkup Pusrisikan dan pengoptimalan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana.

Selain itu, dilakukannya pemantauan dan evaluasi setiap bulannya. Agar kontrak kinerja yang ditargetkan dapat tercapai dengan baik.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Pelayanan Teknis dan Jasa Riset Perikanan Layanan Pengelolaan PNBP dengan anggaran sebesar Rp.2.491.975.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.498.386.396 (20,00%).

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) satuan kerja lingkup Pusrisikan antara lain :

Tabel 10 Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lingkup Pusrisikan

No	UPT	Periode	Target		Realisasi	%	Surat Penyampaian
			Tahunan	Triwulan I	Triwulan I		
1	BRPPUPP	Triwulan	40.000.000	12.745.639	14.552.427	36%	B.3336 /BPPSDM.1/ KU.340/ IV/2024
2	BRPSDI		2.000.000	500.000	4.813.840	241%	
3	BBRBLPP		549.900.000	150.000.000	195.551.397	36%	
4	BRBAPPP		1.610.607.000	52.650.000	297.765.636	18%	
5	BRBATPP		92.050.000	17.756.000	46.885.315	51%	
6	BRBIH		177.044.000	8.265.000	9.080.000	5%	
7	BRPI		408.420.000	50.000.000	241.116.675	59%	
8	LRBRL		14.050.000	1.340.000	13.545.433	96%	
<b>Total</b>			<b>2.894.071.000</b>	<b>293.256.639</b>	<b>823.310.723</b>	<b>280,75%</b>	

## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

### Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT Lingkup Pusat Riset Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup BPPSDM diantaranya : Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV UPT Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Penyedia Jasa Lainnya

Orang Perorangan (PJLP) tidak termasuk dalam perhitungan IK Tenaga kerja yang terlibat pada SFV UPT lingkup Pusat Riset Perikanan, meskipun terlibat langsung/tidak langsung dalam Kegiatan SFV UPT.

Indikator ini diperoleh dari persentase Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada SFV UPT lingkup Pusat Riset Perikanan. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Data tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung by name by address dan aktivitas masing-masing tenaga kerja yang disahkan pimpinan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 192 (seratus sembilan puluh dua) orang. Pada Triwulan I Tahun 2024 ini, IKK Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT Lingkup Pusat Riset Perikanan (Orang) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun. IKK ini merupakan IKK baru di tahun ini, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya maupun rencana jangka menengah 2020-2024. Namun dapat disampaikan progress yang dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 ini dilakukan proses perencanaan layanan perencanaan dan penganggaran dukungan program prioritas.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dukungan Program Prioritas dengan anggaran sebesar Rp.4.257.071.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.412.605.318 (9,69%).

### INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

#### Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan

Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2023.

Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan (LK) unit Eselon II Tahun 2023 terhadap jumlah realisasi anggaran unit Eselon II Tahun 2023. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi minimize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat Penyampaian Nilai LHP BPK dari BPPSDM KP.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target  $\leq 0,5\%$  (kurang dari sama dengan nol koma lima persen). Pada Triwulan I Tahun 2024 ini, IKK Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir Tahun. Namun dapat disampaikan masih dilakukan penggunaan anggaran sesuai aturan berlaku dan memantau proses administrasi keuangan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK dan Pengawasan Inspektorat Jenderal dengan anggaran sebesar Rp.545.761.500 dan telah terealisasi sebesar Rp.98.909.295 (18,12%).

## **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4**

### **Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran

kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023.

Indikator ini diperoleh dari nilai yang diukur setiap Tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode semesteran, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa surat hasil pengukuran IP ASN dari BRSDM KP dan nilainya dapat diakses melalui <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023>. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 82 (delapan puluh dua) indeks profesional ASN Pusat Riset Perikanan. Pada Triwulan I Tahun 2024 ini, IKK Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada semesteran. Namun dapat disampaikan progres pengembangan sumberdaya manusia Pusrisikan dalam mengikuti seminar kegiatan lainnya untuk mendukung kompetensinya sehingga dapat meningkatkan nilai kompetensi pegawai Pusrisikan selain melakukan pengisian SKP melalui aplikasi eKinerja BKN.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM dengan anggaran sebesar Rp.594.138.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.115.357.327 (19,42%).

## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

### Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)

Nilai PM SAKIP Level II BPPSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II lingkup BPPSDM.

Nilai PM SAKIP Level II lingkup BPPSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDM. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan metode cascading buat baru serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen, dan/atau Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BPPSDM.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 80 (delapan puluh) nilai mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan. Pada Triwulan I Tahun 2024 ini, IKK Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun atau setelah dilakukan penilaian mandiri SAKIP. Namun dapat disampaikan progres yang telah dilakukan antara lain mempersiapkan dan merapihkan dokumen pendukung penilaian mandiri SAKIP Tahun 2024. Dokumen yang dimaksud antara lain dokumen perencanaan kinerja, dokumen pengukuran kinerja, dokumen pelaporan kinerja, dan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Penyusunan Rencana dan Program Riset Penilaian SAKIP Riset Perikanan dengan anggaran sebesar Rp.358.065.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.26.447.565 (7,39%).

## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

### Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)

Rekonsiliasi kinerja Pusat Riset Perikanan adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Pusat Riset Perikanan. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja Pusat Riset Perikanan, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II Setjen untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik.

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Nilai Rekonsiliasi Kinerja berdasarkan Nilai Aspek Kepatuhan, Nilai Aspek Kesesuaian, Nilai Aspek Ketercapaian, Nilai Aspek Ketepatan. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja lingkup Pusrisikan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat Penyampaian hasil rekonsiliasi kinerja dari BPPSDM KP dan Kertas Kerja Rekonsiliasi Kinerja yang ditandatangani oleh Pembahas dan Kepala Pusrisikan.

Pada Tahun 2024 ini Pusat Riset Perikanan memiliki target nilai rekonsiliasi kinerja sebesar 94 (sembilan puluh empat). Pada Triwulan I Tahun 2024 ini, IKK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun. Namun dapat disampaikan progress yang telah dilakukan samapi dengan Triwulan I Tahun 2024 antara lain mempersiapkan dokumen pendukung rekonsiliasi kinerja terdiri dari dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Penyusunan Laporan dan Bahan Refleksi Outlook dengan anggaran sebesar Rp.280.058.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.21.824.455 (7,79%).

## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

### Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di Level Pusat Lingkup BPPSDM Tahun 2024 diantaranya. Menggunakan Aplikasi (collaboration office) dengan alamat [portal.kkp.go.id](http://portal.kkp.go.id). Pengukuran level 2 dihitung dengan lingkup Level Pusat Lingkup BPPSDM (Sekretaris/Kepala Pusat/Balai & Ketua Tim Kerja). Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan nilai 3 poin. Bobot Komponen Keaktifan diantaranya Konten dokumentasi tulisan kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5; Konten berupa karya infografis poin 1; Konten berupa jurnal/video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan serta dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusrisikan sebagai sumber datanya dengan Sekretariat BPPSDM (PUSDATIN). Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat Capaian IKU MP dari BPPSDM KP.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 94% (sembilan puluh empat persen) unit kerja Pusat Riset Perikanan yang menerapkan sistem pengetahuan terstandar. Capaian IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 11 Capaian IKK7–Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

IKK 7–Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)										
Realisasi TW I				Tahun 2024					Renstra Pusrisikan 2020–2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2023–2024	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
50	88,3	100	97,04	94	94	108,33	115,24	18,84	90	120,36

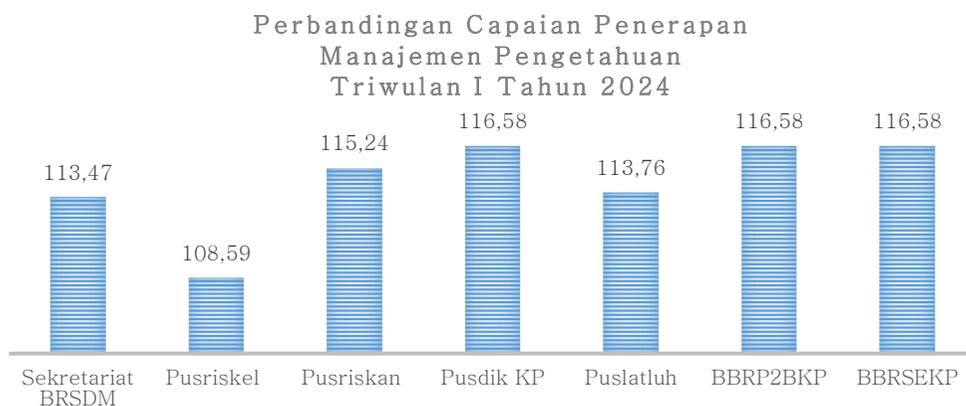
Pada Triwulan I Tahun 2024 ini, IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar telah tercapai sebesar 108,33% dari target Triwulan I Tahun 2024 sebesar 94% atau terealisasi 115,24%. Capaian ini mengalami kenaikan capaian sebesar 18,84% dari Triwulan I Tahun sebelumnya, hal ini disebabkan keaktifan yang lebih baik dengan menggunakan *platform Portal Collaboration Office* ([portal.kkp.go.id](http://portal.kkp.go.id)). Sesuai dengan Surat Nomor B.3300/BPPSDM.1/TU.210/IV/2024 a.n. Kepala BPPSDM, Plt.Sekretaris BPPSDM perihal Capaian Nilai Akhir IKU MP Terstandar Lingkup KKP Triwulan I 2024 tanggal 5 April 2024.

Dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 dengan target 90, maka capaian Triwulan I Tahun 2024 telah melampaui capaian hingga 120,36%. Target renstra indikator kinerja ini lebih kecil dari target Tahun 2024 dipengaruhi oleh dilakukan penyesuaian target jangka menengah Pusrisikan terhadap penyesuaian kebijakan perubahan target tahun berjalan.

Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusrisikan dalam penerapan manajemen pengetahuan Triwulan I Tahun 2024 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Pusrisikan memperoleh peringkat ke empat dari tujuh unit Eselon II di BPPSDM KP. Capaian penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BRSDM KP Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 12 Perbandingan IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BRSDM	Pusriskel	Pusriskan	PusdikKP	Puslatluh	BBRP2BKP	BBRSEKP
<b>Target</b>	94	94	94	94	94	94	94
<b>Realisasi</b>	106,67	102,08	108,33	133,33	106,94	133,33	133,33
<b>%</b>	113,47	108,59	115,24	120,00	113,76	120,00	120,00



Gambar 7 Perbandingan Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I Tahun 2024, faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh tersedianya aplikasi *platform Portal Collaboration Office* ([portal.kkp.go.id](http://portal.kkp.go.id)) yang mudah diakses. Keaktifan yang setiap koordinator/ketua tim kerja dalam menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar ini.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain terlaksananya kegiatan-kegiatan positif yang dapat dibagikan di aplikasi *platform Portal Collaboration Office* ([portal.kkp.go.id](http://portal.kkp.go.id)). Dilakukan pula monitoring dan evaluasi setiap bulannya, baik dari segi dokumen maupun keaktifannya agar lebih efektif lagi dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Data dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp.463.420.500 dan telah terealisasi sebesar Rp.35.609.771 (7,08%).

## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

### Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Perikanan (%)

Rekomendasi hasil pengawasan diperoleh dari persentase jumlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti berdasarkan total rekomendasi yang diperoleh. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode Triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BPPSDM KP.

Pada Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ditetapkan target 82% (delapan puluh dua persen) rekomendasi hasil pengawasan yang telah dilengkapi dan disampaikan. Capaian IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 13 Capaian IKK 8–Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)

IKK 8–Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)

Realisasi TW I				Tahun 2024					Renstra Pusrisikan 2020–2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2022–2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
-	41	-	75	82	82	100	120,00	25	80	125,00

Pada Triwulan I Tahun 2024, target IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan ini ditetapkan sebesar 82%. Mengacu kepada Surat a.n. Kepala BPPSDM, Plt.Sekretaris BPPSDM Nomor : B.3334/BPPSDM.1/KU.520/IV/2024 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2024, tanggal 17 April 2024. Hasil pengukuran sampai dengan Triwulan I, Pusrisikan terdapat 9 (sembilan) temuan awal dan sudah ditindaklanjuti

sehingga nilai capaian IKK ini mencapai nilai 100,00% dari target 82% atau 121,25%, karena pada aplikasi kinerja nilai toleransi maksimal adalah 120,00% sehingga persentasenya adalah 120,00%. Apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun sebelumnya memiliki nilai capaian yang lebih baik, capaian indikator ini mengalami peningkatan sebesar 25% dipengaruhi oleh ada atau tidaknya temuan dan kecepatan tindak lanjut terhadap temuan. Dalam rencana jangka menengah 2020–2024, target IKK ini ditetapkan sebesar 80, jika dibandingkan dengan realisasi 2023 ini telah tercapai sebesar 125,00%.

Capaian IKK diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023 (Triwulan IV Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2024 (Triwulan I Tahun 2024); Seperti disampaikan bahwa Pusrisikan Ancol terdapat 9 (sembilan) temuan, BRPBATPP Bogor terdapat 3 (tiga) temuan, BBRBLPP Gondol terdapat 3 (tiga) temuan, BRBIH Depok 5 (lima) temuan, BRPPUPP Palembang 5 (lima) temuan, BRPBAPPP Maros terdapat 5 (lima) temuan, dan sudah ditindaklanjuti temuannya. Kecuali BBRBLPP Gondol yang baru 1 (satu) temuan yang ditindaklanjuti. Berikut rincian persentase tindak lanjut temuan itjen dilingkup Pusrisikan.

Tabel 14 Data Rekapitulasi persentase rekomendasi hasil pengawasan Pusrisikan

No	Satker Pusat/UPT	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Pusrisikan, Ancol	9	9	100,00
2	BRPBATPP, Bogor	3	3	100,00
3	BBRBLPP, Gondol	3	1	33,33
4	BRBIH, Depok	5	5	100,00
5	BRPPUPP, Palembang	6	6	100,00
6	BRPBAPPP, Maros	4	4	100,00
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>28</b>	<b>93,33</b>

Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusrisikan dalam persentase rekomendasi hasil pengawasan

Tahun 2024 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Pusriskan dan Sekretariat BPPSDM memiliki nilai yang sama 100,00% dengan persentase capaian yang sama sebesar 120,00%. Selain itu terdapat 3 (tiga) eselon II yang tidak memiliki temuan Pusriskel, PusdikKP, dan PuslatluhKP. Capaian penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BRSDM KP Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 15 Perbandingan IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BRSDM	Pusriskel	Pusriskan	PusdikKP	Puslatluh	BBRP2BKP	BBRSEKP
<b>Target</b>	82	82	82	82	82	82	82
<b>Realisasi</b>	100	82	100,00	82	82	100	71,43
<b>%</b>	120,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00	87,11



Gambar 8 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan (%)

Faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain terlaksananya administrasi keuangan dan perbendaharaan yang baik. Serta antisipasi permasalahan atau adanya kesalahan dalam administrasi. terselesaikannya dokumen tindaklanjut yang baik dengan koordinasi yang baik.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini dipengaruhi oleh terselesaikannya tindaklanjut hasil pengawasan yang dikerjakan,

komitmen pimpinan bersama tim keuangan maupun perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam proses administrasi keuangan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Manajemen Keuangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)/Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)/Manajemen Risiko (MR) dengan total anggaran sebesar Rp.429.174.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.118.074.457 (27,51%).

## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

### Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran diperoleh dari konversi nilai indikator dan bobot indikatornya, terdapat 8 (delapan) indikator antara lain revisi DIPA, deviasi RDP, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode semesteran, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat Capaian Nilai IKU IKPA dari Biro Keuangan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan dengan target nilai 93,76 (sembilan puluh tiga koma tujuh enam). Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan tersaji pada tabel berikut.

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini, IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada semesteran. Namun sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sudah dilakukan penginputan data capaian output pada aplikasi SAKTI modul komitmen sebagai progress capaian output Pusat Riset Perikanan.

Dengan adanya penyesuaian administrasi keuangan maupun penyesuaian rencana penarikan dana, yang mempengaruhi waktu terlaksananya kegiatan. Pada Tahun sebelumnya masih berlaku kebijakan satu dipa sehingga Pusrisikan dan Pusriskel menggunakan akun yang sama, kedepannya dengan adanya organisasi baru dengan DIPA Ancol menjadi DIPA Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus mempersiapkan proses administrasi yang baru mengikuti perkembangan organisasi yang ada.

Anggaran yang mendukung IKK ini terdiri dari kegiatan Layanan Manajemen Keuangan, Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan, Layanan Pengelolaan PBJ, Gaji dan Tunjangan, Tunjangan Kinerja Riset Perikanan, Gaji dan Tunjangan PPPK, Langganan Daya dan Jasa Pusrisikan, Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Pusrisikan, Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Riset Perikanan, Layanan Sarana Internal dengan total anggaran sebesar Rp.28.617.579.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.6.049.226.690 (21,14%).

## **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10**

### **Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)**

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan

pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan pemerintah

Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Nota Dinas dari Biro Keuangan / Capture Aplikasi SMART DJA KEMENKEU.

Pada Tahun 2024 ini Pusat Riset Perikanan memiliki target 82 (delapan puluh dua) nilai kinerja anggaran Pusat Riset Perikanan. Pada Triwulan I Tahun 2024 ini, IKK Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada Tahunan. Namun demikian, dapat disampaikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 ini sudah dilakukan penginputan data capaian output pada aplikasi SAKTI modul komitmen sebagai bahan capaian yang akan terintegrasi dengan aplikasi Smart DJA.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Penyusunan dan Revisi Anggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Monev dan Capaian Kinerja dengan anggaran sebesar Rp.20.162.836.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.3.129.592.131 (15,52%).

## **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11**

### **Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)**

Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan

dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan.

Indikator ini diperoleh dari jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Naskah Perjanjian Kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya: Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll dan Laporan Kegiatan Kemitraan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 36 (tiga puluh enam) dokumen kemitraan. Pada Triwulan I Tahun 2024 ini, IKK Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan) belum memiliki target capaian. Namun dapat disampaikan telah dilakukan persiapan dan inisiasi dengan beberapa mitra di lingkup Pusrisikan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Pelayanan Kerjasama Riset Perikanan, Pelayanan Kehumasan Riset Perikanan, Layanan Direktif Eselon I dengan anggaran sebesar Rp.575.976.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.56.329.576 (9,78%).

## **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 12**

### **Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%)**

Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Riset Perikanan berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.

Persentase dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang tersedia dibandingkan total dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang tersedia dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan pengelolaan aset, kepegawaian, berupa laporan, matriks, screenshot aplikasi. IKK ini merupakan Indikator Kinerja Mandatory (IKM).

Pada Tahun 2024 ini Pusat Riset Perikanan memiliki target 100% (seratus persen) layanan dukungan manajemen internal Pusat Riset Perikanan. Berikut merupakan capaian Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Riset Perikanan :

Tabel 16 Capaian IKK 12–Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%)

IKK 12–Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%)											
Realisasi TW I				Tahun 2024					Renstra Pusrisikan 2020–2024		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2023–2024	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024	
–	–	100	100	100	100	100	100,00	0,00	100	100,00	

Pada Triwulan I Tahun 2024, target IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan ini ditetapkan 100,00% dan dilakukan pengukuran secara Triwulan dengan target Tahunannya juga sebesar 100,00%. Nilai capaian IKK ini mencapai 100,00% atau 100,00% dari target 100,00%. Capaian ini indikator kinerja ini stabil diangka 100,00% dari tahun lalu sampai dengan Tahun 2024 ini. Dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 juga merupakan target yang stabil di angka 100,00% setiap Tahunnya. Adapun rincian dokumen yang telah dihasilkan antara lain :

Tabel 17 Rincian Dokumen Manajemen Internal Pusat Riset Perikanan

No	Judul	Target	Realisasi	%
		TW 1	TW 1	
1	Bulanan	3	3	100%
2	Renaksi	1	1	100%
3	Rincian target IKU	1	1	100%
4	Informasi Cascading	1	1	100%
5	Manual IKU	1	1	100%
6	Perjanjian Kinerja	1	1	100%
Total		8	8	100%

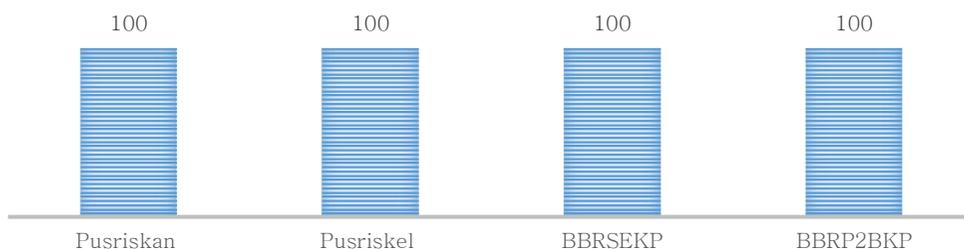
Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain seperti Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), dan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) capaian

dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya memiliki capaian yang sama di setiap unit Eselon II lainnya. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 18 Perbandingan IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya

	Pusriskan	Pusriskel	BBRSEKP	BBRP2BKP
<b>Target</b>	100	100	100	100
<b>Realisasi</b>	100	100	100	100
<b>%</b>	100,00	100,00	100,00	100,00

Perbandingan Capaian Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Triwulan I Tahun 2024



Gambar 9 Perbandingan Capaian Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Triwulan I Tahun 2024 dengan Eselon II Lainnya

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah dengan tetap terselenggaranya kegiatan-kegiatan manajerial walaupun dengan diblokirnya anggaran. Capaian Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKK lain. Prosentase dokumen layanan menejemen yang tersedia/dibandingkan total dokumen layanan menejemen yang ditargetkan.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatannya secara berkala. Selain itu, dengan koordinasi yang baik setiap kegiatan manajerial dapat di laksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan BMN, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Kesekretariatan Pimpinan, Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran Pusriskan, Pemeliharaan Kantor, Layanan Manajemen SDM, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Layanan Penyelenggaraan Kearsipandengan anggaran sebesar Rp.70.173.946.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.13.616.691.148 (19,40%).

### **Capaian Kinerja Lainnya**

Di samping Sasaran Strategis di atas terdapat beberapa keberhasilan kinerja antara lain:

#### **Tugas Belajar, Izin Belajar dan Training**

Petugas belajar di lingkungan Pusat Riset Perikanan sebanyak 45 pegawai, diantaranya melakukan tugas belajar di jenjang Strata 1 sampai dengan Strata 3. Petugas belajar di jenjang Strata 1 berjumlah 1 pegawai, petugas belajar di jenjang Strata 2 berjumlah 20 pegawai, dan petugas belajar Strata 3 berjumlah 24 pegawai. 7 pegawai diantaranya melakukan perpanjangan masa tugas belajar, 5 pegawai telah lulus tugas belajar dan telah aktif kembali dan sisanya masih dalam masa tugas belajar.

Selain tugas belajar, pegawai di lingkungan Pusat Riset Perikanan juga beberapa melakukan izin belajar sebanyak 68 pegawai. Pegawai yang melakukan izin belajar di jenjang Strata 1 sebanyak 26 pegawai, sebanyak 29 pegawai izin belajar di jenjang Strata 2, dan 8 pegawai izin belajar di jenjang Stara 3.

#### **Penghargaan**

## Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I Tahun 2024 Program dan Kegiatan lingkup Pusat Riset Perikanan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp.128.950.000.000 atau 18,75% dari alokasi anggaran sebesar Rp.24.179.054.127. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan oleh unit kerja lingkup Pusat Riset Perikanan. Penyerapan anggaran berdasarkan Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 1 April 2024, sebagai berikut :

Tabel 19 Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lingkup Pusrisikan (%)

NO	SATKER	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Pusrisikan, Ancol	15.245.277.000	2.816.847.306	18,48
2	BRPL, Ancol	15.647.102.000	2.813.154.479	17,98
3	BRPPU-PP, Palembang	15.776.627.000	3.327.965.940	21,09
4	BRPSDI, Jatiluhur	17.412.456.000	3.165.609.984	18,18
5	BBRBL-PP, Gondol	14.458.604.000	2.627.633.269	18,17
6	BRPBAP-PP, Maros	11.729.974.000	2.763.629.467	23,56
7	BRPBAT-PP, Bogor	10.857.446.000	1.783.913.812	16,43
8	BRBIH, Depok	6.954.877.000	1.335.688.923	19,21
9	BRPI, Sukamandi	5.990.158.000	1.226.610.767	20,48
10	LRPT, Bena	6.612.506.000	847.544.858	12,82
11	LRBRL, Gorontalo	4.581.931.000	862.372.547	18,82
12	LRMPHP, Bantul	3.683.042.000	608.082.775	16,51
TOTAL		128.950.000.000	24.179.054.127	18,75

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat satuan kerja di lingkup Pusrisikan dengan realisasi tertinggi adalah Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan (BRPBAP-PP), Maros sebesar 23,56%, dan untuk realisasi terendah adalah Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT), Palembang sebesar 12,82%. Namun, secara keseluruhan realisasi satuan kerja lingkup Pusrisikan masih dianggap baik.

Dalam pelaksanaan anggaran, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu buka blokir anggaran pada kegiatan dukungan manajemen namun tidak mempengaruhi kinerja pelaksanaan

anggaran selama Triwulan I Tahun 2024. Secara umum kinerja Pusrisan Triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasilkan tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti penyesuaian rencana penarikan dana dan rencana operasional kegiatan setelah adanya kebijakan buka blokir. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana dan rencana operasional sejak awal tahun apabila ada kegiatan yang di blokir.

Tabel 20 Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Triwulan I Tahun 2024

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target IK</b>	<b>Realisasi IK</b>	<b>%</b>	<b>Kegiatan Pendukung RKAKL</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah)	293.500.639	823.310.723	280,51	Pelayanan Teknis dan Jasa Riset Perikanan Layanan Pengelolaan PNBP	2.491.975.000	498.386.396	20,00
2	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT Lingkup Pusat Riset Perikanan (Orang)	-	-	-	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dukungan Program Prioritas	4.257.071.000	412.605.318	9,69
3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)	-	-	-	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK dan Pengawasan Inspektorat Jenderal	545.761.500	98.909.295	18,12
4	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	-	-	-	Peningkatan Kompetensi SDM	594.138.000	115.357.327	19,42
5	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	-	-	-	"Penyusunan Rencana dan Program Riset Penilaian SAKIP Riset Perikanan"	358.065.000	26.447.565	7,39
6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	-	-	-	Penyusunan Laporan dan Bahan Refleksi Outlook	280.058.000	21.824.455	7,79
7	Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen	94	108,33	115,24	Layanan Data dan Informasi	463.420.500	35.609.771	7,68

Indikator Kinerja	Target IK	Realisasi IK	%	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Pengetahuan Terstandar (%)							
8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	82	100	121,95	Layanan Manajemen Keuangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)/Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)/Manajemen Risiko (MR)	429.174.000	118.074.457	27,51
9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	-	-	-	"Layanan Manajemen Keuangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Layanan Pengelolaan PBJ Gaji dan Tunjangan Tunjangan Kinerja Riset Perikanan Gaji dan Tunjangan PPPK Langganan Daya dan Jasa Pusrisikan Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Pusrisikan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Riset Perikanan Layanan Sarana Internal"	28.617.579.000	6.049.226.690	21,14

	Indikator Kinerja	Target IK	Realisasi IK	%	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
10	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	-	-	-	"Penyusunan dan Revisi Anggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi Monev dan Capaian Kinerja"	20.162.836.000	3.129.592.131	15,52
11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	-	-	-	"Pelayanan Kerjasama Riset Perikanan Pelayanan Kehumasan Riset Perikanan Layanan Direktif Eselon I"	575.976.000	56.329.576	9,78
12	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100	100	100,00	"Layanan BMN Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Kesekretariatan Pimpinan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran Pusrisikan Pemeliharaan Kantor Layanan Manajemen SDM Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Layanan Penyelenggaraan Kearsipan"	70.173.946.000	13.616.691.148	19,40
<b>Jumlah</b>				<b>114,50</b>		<b>128.950.000.000</b>	<b>24.179.054.127</b>	<b>18,75</b>

## Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya

Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) merupakan satuan kerja di bawah Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

### Efisiensi Anggaran

Hasil perhitungan efisiensi anggaran Pusat Riset Perikanan adalah hasil pengukuran yang akan didapatkan pada akhir tahun. Hasil perhitungan efisiensi anggaran Pusriskan sebagaimana biasanya melalui aplikasi Smart DJA, sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 ini belum dapat ditampilkan karena masih dalam penginputan capaian di aplikasi SAKTI. Pembaharuan data nilai kinerja baru akan diupdate pada awal bulan Mei mendatang.

Nilai SMART tersebut pada dasarnya merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, memiliki Nilai Efisiensi yang berasal dari variable efisiensi yang mencapai. Nilai efisiensi didapatkan dari membandingkan antara capaian keluaran (output) program, data realisasi anggaran dan data pagu anggaran, sedangkan efisiensi diukur dengan membandingkan dengan dua indikator variabel penilaian, yaitu realisasi anggaran dan capaian output. Angka Efisiensi dipengaruhi oleh capaian output DIPA Ancol

(Pusriskan dan Pusriskel) dengan nilai CRO (Capaian Rincian Output). Adapun, efisiensi yang menunjukkan ini adalah tidak menjadi variable yang *independen* (bebas), namun merupakan variable yang terikat, yaitu terikat dengan nilai realisasi anggaran dan nilai capaian keluaran (output) sehingga nilainya sangat menentukan dalam menggambarkan progress nilai kinerja anggaran yang sangat penting menjadi perhatian dalam monitoring dan evaluasi suatu organisasi. Nilai akhir Kinerja Anggaran dalam Smart DJA sangat dipengaruhi oleh nilai efisiensi yang dimaksud, tingginya nilai kinerja efisiensi berimplikasi pada tingginya Nilai Akhir Kinerja Anggaran. Sementara itu, jika nilai efisiensi rendah, maka akan berkontribusi pada rendahnya Nilai Kinerja Anggaran.

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran dan sumber daya pada Pusriskan yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta penyesuaian. Efisiensi tersebut merupakan hasil evaluasi anggaran dan sumber daya yang akan didapatkan setelah melalui reuiu anggaran maupun kinerja. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 Pusriskan telah melakukan revisi anggaran sebanyak 2 (dua) kali, berikut rinciannya.

Tabel 21 Kronologi Revisi Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2024

DIPA	Tanggal	Pagu	Pengesahan Revisi	Ket
Awal	24 November 2023	15.245.277.000		
Revisi DIPA-1 Blokir AA (Revisi DJA)	29 Januari 2024	15.245.277.000	S-84/AG/AG.3/2024 tanggal 29 Januari 2024	Blokir AA (Dukman 2.450.000.0000)
Revisi DIPA-2	19 Februari 2024	15.245.277.000	193/KPA/BRSDM/II/2024 tanggal 16 Februari 2024	Revisi POK dan Revisi Lembar 3 DIPA Triwulan I

## Efisiensi Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia Lingkup Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) mengalami penurunan atau cenderung berkurang dibandingkan pada awal Tahun 2023 yang lalu, diantaranya pegawai dengan tingkat pendidikan S3 menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun-Tahun sebelumnya, karena adanya mutasi pegawai Lingkup Pusriskan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan

Perpres 78 Tahun 2021. Diantaranya jabatan fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, dan Perekayasa. Secara keseluruhan, jumlah pegawai Lingkup Pusrisikan pada Tahun 2023 berkurang sebesar 51,51% dibandingkan pada Tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan jumlah pegawai yang mutasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Namun demikian seluruh kegiatan tetap dapat berjalan secara optimal dengan SDM yang ada sehingga target kinerja dapat tercapai.



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

#2024  
KKP BEYOND



# PENUTUP

# BAB IV

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sesuai dengan visi dan misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di atas, pada Tahun 2024 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 1 (satu) Sasaran Kinerja (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran Kinerja (SK) yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Berdasarkan aplikasi kinerjajaku, capaian sasaran strategis Pusriskan dengan toleransi 0% menunjukkan Status Sasaran Strategis Indikatornya berwarna Biru atau Istimewa. Hal ini karena Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Triwulan I Tahun 2024 ini seluruh capaian telah tercapai dengan capaian 114,50%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Sasaran Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024, seluruhnya dapat tercapai.

Dari aspek kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Pusriskan Tahun 2024 dikategorikan baik karena realisasi keuangannya dapat mencapai Rp.24.179.054.127 atau 18,75% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.128.950.000.000.

### Permasalahan dan Tindaklanjut

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Pusat Riset Perikanan Tahun 2024 dicapai dengan baik, yang persentase pencapaiannya digambarkan mengalami kenaikan pada perkembangan fisik kegiatan

dari masing-masing Sasaran Kegiatan di setiap periode waktu baik bulanan maupun triwulanan. Dalam proses pencapaian kinerjanya, sampai dengan Triwulan I secara keseluruhan telah tercapai dengan baik tanpa ada permasalahan. Untuk selanjutnya, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan pada triwulan berikutnya yang memiliki tantangan berbeda sehubungan dengan terbitnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru. Perubahan Perjanjian Kinerja, IKK dan target Pusat Penyuluhan KP menjadi ekspektasi dan atau obsesi besar pada Triwulan II Tahun 2024 ini, terutama Sasaran Kinerja dan IKK substantif yang terkait penyuluhan.

Dengan rencana aksi dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, kata kunci konsolidasi dan koordinasi cepat, dipastikan akan menghasilkan percepatan, kecepatan, efektifitas, keselarasan, konsistensi baik terkait menejerial ataupun kegiatan substantif terutama optimalisasi pemanfaatan/penggunaan/penarikan dana yang harus sesuai target dan konsekuensi mutu hasil kegiatan.

## Penutup

Selaras dengan capaian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP, pencapaian Kinerja Pusrisikan terhadap Target Sasaran Kinerja IPTEK penelitian dan pengembangan perikanan pada Tahun 2024 dengan tindakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dapat menjadi salah satu upaya strategis dalam merumuskan kebijakan dan program di Tahun mendatang.

Kinerja pada dasarnya adalah Komitmen, Konsistensi dan Konsekuensi dalam merencanakan, melaksanakan, mencapai dan menghasilkan output yang berkualitas, yang akan berdampak pada kualitas hasil yang diharapkan. Untuk mencapainya, akan selalu diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak dalam melaksanakan komitmen yang telah ditetapkan. Komitmen harus direncanakan dengan cermat, intuitif, solusif, konstruktif dan inovatif untuk mengemban amanah (visi, misi, tujuan dan sasaan) IPTEK Kelautan dan Perikanan. Hasil kinerja yang tercapai tentu tidak hanya menjadi laporan yang

selanjutnya akan didokumentasikan dan kemudian diarsipkan, namun harus menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan kedepan, dan dapat memberikan dampak dalam aplikasi nyata kebijakan pembangunan KP serta pemenuhan Komitmen dalam RPJM RI 2021–2024, Visi KKP, Misi Badan Riset dan SDM KP dan Renstra Pusriskan 2021–2024.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan harus dilakukan lebih cermat dan matang, dengan mempertimbangkan sasaran dan tujuan organisasi secara tepat sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dan faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan yang terjadi. Strategi dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan wawasan untuk mengetahui perkembangan issue dan permasalahan terkini harus selalu diupayakan dalam memulai langkah di Tahun mendatang.

Akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) Pusriskan Triwulan I Tahun 2024 diharapkan menjadi “cermin” sekaligus pertanggung jawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah dan tindakan kedepan dalam perencanaan. Dengan demikian harapan bahwa terbentuknya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud. Selain itu, LKj ini dapat juga menjadi salah satu kontribusi dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di Tahun mendatang.



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

#2024  
KKP BEYOND



# lampiran

# LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Pusrisikan 2024 awal (27 Desember 2023)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT RISET PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu  
Kepala Pusat Riset Perikanan

**I Nyoman Radiarta**

**Yayan Hikmayani**

Kolom Pengesahan		
No	PenanggungJawab	Paraf
1.	Sekretaris BRSDM	
2.	Katimja. Program Pusrisikan	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT RISET PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah)	2.894.071.000
		2	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT Lingkup Pusat Riset Perikanan (Orang)	192
		3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)	≤ 0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	82
		5	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	80
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	94
		7	Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	82
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93,76
		10	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82
		11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	36
		12	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100

### Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	128.950.000.000
<b>Total Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2024</b>		<b>128.950.000.000</b>

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

  
I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu  
Kepala Pusat Riset Perikanan

  
Yayan Hikmayani



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT RISET PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu  
Kepala Pusat Riset Perikanan

  
I Nyoman Radiarta

  
Yayan Hikmayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT RISET PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah)	2.894.071.000
		2	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT Lingkup Pusat Riset Perikanan (Orang)	192
		3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)	≤ 0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	82
		5	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	80
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	94
		7	Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	82
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93,76
		10	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82
		11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	36
		12	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100

**Data Anggaran**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	128.950.000.000
<b>Total Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2024</b>		<b>128.950.000.000</b>

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

  
I Nyoman Radarta

Pihak Kesatu  
Kepala Pusat Riset Perikanan

  
Yayan Hikmayani



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT RISET PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu  
Kepala Pusat Riset Perikanan

  
**I Nyoman Radiarta**

  
**Yayan Hikmayani**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT RISET PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1 Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan (Rupiah)	2.894.071.000
		2 Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT Lingkup Pusat Riset Perikanan (Orang)	192
		3 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Riset Perikanan (%)	≤ 0,5
		4 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Perikanan (Indeks)	82
		5 Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Perikanan (Nilai)	80
		6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	94
		7 Persentase Unit Kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Perikanan (%)	82
		9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	93,76
		10 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (Nilai)	82
		11 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Riset Perikanan (Kemitraan)	36
		12 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	100

### Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	128.950.000.000
<b>Total Anggaran Pusat Riset Perikanan Tahun 2024</b>		<b>128.950.000.000</b>

Jakarta, 27 Desember 2023

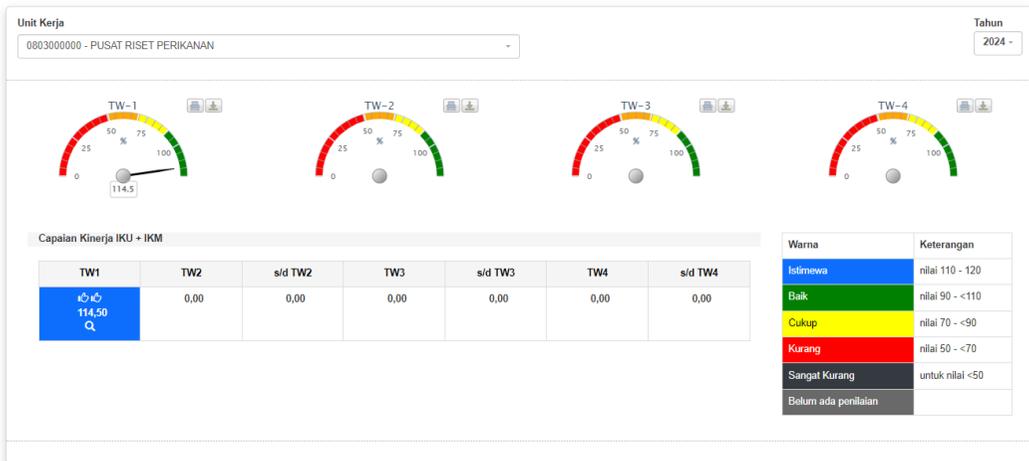
Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

  
I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu  
Kepala Pusat Riset Perikanan

  
Yayan Hikmayani

# Lampiran Nilai NPSS Pusriskan (Kinerjaku)



Daftar Capaian Unit Kerja Tahun: 2024

Level-1: PUSAT RISET PERIKANAN

Level-2: Belum di pilih...

Level-3: Belum di pilih...

Download | Tutup

TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
0803000000 - PUSAT RISET PERIKANAN 114.50% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙
0803100000 - BALAI RISET PERIKANAN LAUT, JAKARTA 106.66% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙
0803110000 - BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN, PALEMBANG 115.57% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙
0803120000 - BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN, JATILUHUR PURWAKARTA 108.08% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙
0803130000 - BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN, MAROS 116.37% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙
0803140000 - BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN, BOGOR 106.37% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙
0803150000 - BALAI RISET PEMULIAAN IKAN, SUKAMANDI 111.11% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙
0803160000 - BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS, DEPOK 112.18% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙
0803170000 - BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN, GONDOL, BULELENG SINGARAJA 101.15% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙
0803180000 - LOKA RISET PERIKANAN TUNA, BENOA 106.66% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙
0803190000 - LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 106.66% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙
0803200000 - LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT, BOALEMO GORONTALO 111.11% +   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙	+   ⊕   ⊙



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430  
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT RISET PERIKANAN  
NOMOR 8/BRSDM.3/TU.110/II/2024**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN KINERJA PUSAT RISET PERIKANAN  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT RISET PERIKANAN**

- Menimbang** : a. bahwa agar pengelolaan kinerja organisasi di Pusat Riset Perikanan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Pusat Riset Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Pusat Riset Perikanan Tahun 2023 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Pusat Riset Perikanan Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-

- KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665).

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT RISET PERIKANAN TENTANG TIM PENGELOLAAN KINERJA PUSAT RISET PERIKANAN TAHUN 2024
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Pusat Riset Perikanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut TPK Pusriskan, yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini;
- KEDUA** : TPK Pusriskan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- A. Penanggung Jawab:
    1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelola kinerja Pusriskan;
    2. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja Pusriskan;
  - B. Pelaksana
    1. Koordinator:  
Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di Pusat Riset Perikanan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;

2. Tim Perencanaan Kinerja:
  - a. Memastikan bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat:
    - 1) visi, misi, dan program;
    - 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
    - 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan ; dan
    - 4) indikator kinerja utama.
  - b. Memastikan bahwa Indikator Kinerja:
    - 1) digunakan sebagai ukuran kinerja formal;
    - 2) indikator kinerja eselon II telah selaras dengan IKU Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
    - 3) indikator kinerja memenuhi kinerja SMART-C; dan
    - 4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Pusat Riset Perikanan.
  - c. Memastikan bahwa dokumen Kontrak Kinerja:
    - 1) perjanjian kinerja;
    - 2) peta strategis;
    - 3) rincian target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/ tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; dan
    - 4) inisiatif strategis/rencana aksi atas perjanjian kinerja.
  - d. Memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
  - e. Memastikan bahwa seluruh sasaran strategis, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput ke dalam aplikasi pengelolaan kinerja; dan
  - f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada Pusat Riset Perikanan.
3. Tim Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja:
  - a. Menyusun pedoman/mechanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
  - b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/ semesteran/tahunan);
  - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
  - d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada Pusat Riset Perikanan;
  - e. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (triwulan dan tahunan);
  - f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/ data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
  - h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan diunggah kedalam laman resmi;
  - i. Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang di Pusat Riset Perikanan;
  - j. Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen, hasil pelaporan kinerja;
  - k. Memastikan seluruh rekaman data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan terdokumentasi dengan baik; dan
4. Tim Evaluasi Kinerja dan Verifikasi Kinerja:
- a. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
  - b. Menyusun laporan nilai evaluasi kinerja yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
  - c. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) di Pusat Riset Perikanan;
  - d. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;
  - e. Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang di Pusat Riset Perikanan;
  - f. Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen, hasil perencanaan kinerja;
  - g. Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen, hasil pengukuran kinerja;
  - h. Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen, hasil pelaporan kinerja;
  - i. Memastikan seluruh rekaman data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan terdokumentasi dengan baik; dan
  - j. Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang di Pusat Riset Perikanan.
5. Tim Kinerja Pegawai:
- a. Menyelaraskan indikator kinerja pegawai dengan indikator kinerja organisasi;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan sasaran kinerja pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawai;
  - c. Memastikan adanya integrasi sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan sistem pengelolaan organisasi;

- d. Memastikan penerapan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) berbasis kinerja pada setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi berkala di Pusat Riset Perikanan.

- KETIGA** : TPK Pusrisikan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai kebutuhan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, TPK Pusrisikan Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Riset Perikanan;
- KELIMA** : Masa kerja TPK Pusrisikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dihitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Pusat ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pusat ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pusat Riset Perikanan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5 Januari 2024

Kepala Pusat Riset Perikanan



  
Yayan Hikmayani, S.Pi, M.Si  
NIP.19671004 199903 2 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT RISET PERIKANAN  
NOMOR 8/BRSDM.3/TU.110/I/2024  
TENTANG TIM PENGELOLAAN KINERJA PUSAT  
RISET PERIKANAN TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KINERJA  
PUSAT RISET PERIKANAN  
TAHUN 2024**

A. Penanggung Jawab :  
Kepala Pusat Riset Perikanan

B. Pelaksana :

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
<b>Tim Perencanaan Kinerja</b>		
1.	Dra. Endang Sriyati Perencana Ahli Madya, Ketua Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Koordinator
2.	Noor Bimo Adhiyudanto, S.Si. Perencana Ahli Muda, Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Anggota
3.	Niken Winarsih, SE.E, M.M Perencana Ahli Muda, Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Anggota
4.	Susanna Purna Dewi Suharto, A.Md.	Anggota
<b>Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja</b>		
1.	Dra. Endang Sriyati Perencana Ahli Madya, Ketua Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Koordinator
2.	Drs. Nurbakti Listyanto Perencana Ahli Muda, Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Anggota
3.	M. Muslim Mandailing, S.P., M.Si.	Anggota
4.	Chitra Restu Agustin, S.E.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
<b>Sub Tim Evaluasi Kinerja dan Verifikasi Kinerja</b>		
1.	Dra. Endang Sriyati Perencana Ahli Madya, Ketua Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Koordinator
2.	Sugesti Titik Maryati, S.E. Perencana Ahli Muda, Tim Kerja Program, Anggaran dan Monev	Anggota
3.	M. Aziz Baharsyah, S.Pi.	Anggota
4.	Ananda Listya, S.Pi.	Anggota
<b>Tim Kinerja Sumber Daya Manusia</b>		
1.	Dra. Hera Rusida, M.M. Analisis Pengelolaan APBN Ahli Madya, KoordinatorTata Usaha	Koordinator
2.	Dwi Primawati, S.H.	Anggota
3.	Norma Tri Utami, A.Md.	Anggota

Kepala Pusat Riset Perikanan



*[Signature]*  
Rizki Hikmayani, S.Pi, M.Si  
NIP.19671004 199903 2 001

Lampiran Surat Tugas Kepala Pusat Riset Perikanan nomor B.789/BRSDM.3/KP444/IV 2023 tanggal 3 April 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KOMPLEK BINA SAMUDERA JL. PASIR PUTIH II LANTAI 2-3,  
ANCOL TIMUR, JAKARTA UTARA 14430  
TELEPON (021) 64700928 EXT 2127  
LAMAN <https://kkp.go.id/brsdm/pusniskan> EMAIL [pusniskan@kkp.go.id](mailto:pusniskan@kkp.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor B.789/BRSDM.3/KP.444/IV/2023

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan mekanisme kerja untuk penyederhanaan birokrasi dan meningkatkan kolaborasi guna mencapai sinergi dalam mewujudkan target kinerja, maka dengan ini menugaskan pegawai yang namanya tertera dalam surat tugas ini.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;  
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;  
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan  
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**MEMBERI TUGAS**

Kepada : sebagaimana terlampir

Untuk : Melaksanakan penugasan sebagai Ketua dan Anggota Tim Kerja dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua Tim Kerja
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja (IK) dalam kelompok kerja terkait;
  - b. membagi peran anggota Tim Kerja sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
  - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
  - d. melakukan pemantauan atas hasil kinerja anggota timnya dan memberikan umpan balik berkala kepada anggota Tim Kerja;
  - e. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana;
  - f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar Tim Kerja dan/atau Unit Kerja lainnya;
  - g. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi intensif antar anggota Tim Kerja;
  - h. melaksanakan kegiatan lain sesuai penugasan Kepala Pusat Riset Perikanan
  
2. Anggota Tim Kerja
  - a. menyusun rencana kerja individu;
  - b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan unit organisasi melalui pembagian peran hasil oleh ketua Tim Kerja;
  - c. melakukan koordinasi dengan sesama anggota dan/atau dengan Tim Kerja lain sesuai kebutuhan;
  - d. melaporkan hasil kerjanya kepada ketua Tim Kerja; dan
  - e. melaksanakan kegiatan lain sesuai penugasan Ketua Tim Kerja.

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 3 April 2023  
Kepala Pusat Riset Perikanan,  
  
Yayan Hikmayani

Tembusan:  
Pegawai yang ditugaskan

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.789/BRSDM.3/KP.444/IV/2023

Tanggal : 3 April 2023

**NAMA DAN URAIAN FUNGSI TIM KERJA PUSAT RISET PERIKANAN  
TAHUN 2023**

NO	NAMA TIM KERJA	URAIAN FUNGSI	INDIKATOR KINERJA
1.	Kemitraan dan PNPB	Koordinasi dan pelaksanaan layanan eksternal dalam kemitraan dan PNPB lingkup Pusat Riset Perikanan, termasuk dukungan SFV	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusriskan (kemitraan)
			Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Riset Perikanan
2.	Program dan Monev	Koordinasi dan pelaksanaan AKIP, penyusunan program, anggaran, monitoring, evaluasi, laporan dan rekonsiliasi kinerja serta nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Riset perikanan	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Perikanan (nilai)
			Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)
			Nilai NKA Pusat Riset Perikanan (nilai)
3.	Keuangan	Koordinasi dan pelaksanaan keuangan (LK, SPIP, MR, PIPK), rekomendasi dan tindaklanjut hasil audit BPK, APIP dan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan anggaran lingkup Pusat Riset Perikanan	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Perikanan 2023
			Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Pusat Riset Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
			Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan (nilai)
4.	SDM Aparatur, Sistem manajemen pengetahuan dan dukungan manajemen lainnya	Koordinasi dan pelaksanaan urusan SDM Aparatur, sistem manajemen pengetahuan terstandar dan dukungan manajemen teknis lainnya lingkup Pusat Riset Perikanan	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan (indeks)
			Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Pusat Riset Perikanan (%)
			Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)



Kepala Pusat Riset Perikanan,

**Yan Hikmayani**

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.18/BRSDM.3/KP.444/IV/2023

Tanggal : 3 April 2023

**SUSUNAN TIM KERJA PUSAT RISET PERIKANAN  
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
A.	Tim Kerja Kemitraan dan PNBP		
1.	Tri Handanari, S.Si, M.Sc	Perencana Madya	Ketua
2.	Ariani Andayani, S.Si, M.Sc	Analisis Kebijakan Madya	Anggota
3.	Ria Faizah, S.Pi, M.Si	Analisis Kebijakan Madya	Anggota
4.	Kamaluddin Kasim, S.Pi., M.Sc	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
5.	Aisyah, ST., M.Si	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
6.	Arief Gunawan, S.Kom	Pustakawan Muda	Anggota
7.	I Gede Bayu Sedana, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota
8.	Fristiya Heri Kartika, S.Kom	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota
9.	Sandi Wibowo, S.T	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
10.	Kusnandi	Pengadministrasi Program dan Laporan	Anggota
11.	Dwi Prasetyo, S.Pi.	Pegadministrasi Kerja Sama	Anggota
12.	Citra Sundawa, S.Kom	Pengadministrasi Data	Anggota
13.	Dedy Supriyadi, S.Kom	Pengadministrasi Program dan Kegiatan	Anggota
B.	Tim Kerja Program dan Monev		
1.	Dra. Endang Sriyati	Perencana Madya	Ketua
2.	Sugesti Titik Maryati S.E.	Perencana Muda	Anggota
3.	Drs. Nurbakti Listyanto	Perencana Muda	Anggota
4.	Hadhi Nugroho, S.T	Perencana Muda	Anggota
5.	Noor Bimo Adhiyudanto, S.Si.	Perencana Muda	Anggota
6.	Niken Winarsih, S.E	Perencana Muda	Anggota
7.	Muhammad M. Mandailing, S.Pi., M.Si	Penyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
8.	Bambang Trias Yulianto, S.Fil., M.Si	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
9.	Asmuil, S.Pi	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
10.	Susanna Purna Dewi Suharto, A.Md.	Pengelola Program dan Laporan	Anggota

11.	Hari Ilhamdi, S.Pi	Perencana Pertama	Anggota
12.	Natasa Kinski, S.Kom	Pengadministrasi Anggaran	Anggota
13.	Dani Candra Rukmana, S.Pi	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota
14.	Ananda Listya, S.Pi	Pengadministrasi Monev dan Pelaporan	Anggota
15.	Chitra Restu Agustin, S.E	Pengadministrasi Monev dan Pelaporan	Anggota
16.	Muhammad Aziz Baharsyah, S.Pi	Pengadministrasi Monev dan Pelaporan	Anggota
C.	Tim Kerja Keuangan		
1.	Dra. Hera Rusida, MM	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	Ketua
2.	Mujib Nikmatuloh, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	Anggota
3.	Ir. Rusmawati Zainy	Pengelola Barang dan Jasa Muda	Anggota
4.	Ridha Afyanti, A.Md	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
5.	Eli Nurcahyani, S.E	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6.	Dwi Ayu Purwanti, A.Md	Pengelola Keuangan	Anggota
7.	Muhammad Aris Nurcholih S.E., M.M	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
8.	Suprpti	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
9.	Iwan Saputra	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
10.	Mohamad Yamin	Pengadministrasi BMN	Anggota
11.	Nasrul Rizal Azhar, S.Sos	Pustakawan Pertama / Pengadministrasi BMN	Anggota
12.	Agung Pranajaya	Pengadministrasi BMN	Anggota
13.	Dwi Primawati, S.H	Analisis SDM Aparatur	Anggota
14.	Tristanto Wahyu Nugroho, S.E	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
15.	Wawan Wahyu, A.Md	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
16.	Susanto	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
D.	Tim Kerja SDM Aparatur, Sistem manajemen pengetahuan dan dukungan manajemen lainnya		
1.	Galuh Laksita Swasti, S.Pi	Perencana Muda	Ketua
2.	Junaedi Abdilah, SE, M.AP.	Arsiparis Muda	Anggota
3.	Ir. Rusmawati Zainy	Pengelola Barang dan Jasa Muda	Anggota
4.	Arief Gunawan, S.Kom	Pustakawan Muda	Anggota
5.	Nasrul Rizal Azhar, S.Sos	Pustakawan Pertama	Anggota
6.	Suyatno A.Md.	Pustakawan Penyelia	Anggota
7.	Fristiya Heri Kartika, S.Kom	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota
8.	Retno Sari Widyanti A.M.d.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Anggota
9.	Dwi Primawati, S.H	Analisis SDM Aparatur	Anggota
10.	Api Yuri Andreas Nurrachman, S.E	Analisis SDM Aparatur	Anggota
11.	Suriani, S.E	Analisis SDM Aparatur	Anggota
12.	Norma Tri Utami, A.Md.	Pengelola Program dan Laporan	Anggota
13.	Eka Sekarwati	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota

14.	Marlea Oktaviani	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
15.	Diana Yulianti	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
16.	I Gede Bayu Sedana, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota
17.	Sandi Wibowo, S.T	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
18.	Muhammad Aris Nurcholis S.E, MM	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
19.	Eri Sulistyowati	Pengadministrasi Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
20.	Mohamad Yamin	Pengadministrasi BMN	Anggota
21.	Agung Pranajaya	Pengadministrasi BMN	Anggota
22.	Haerudin	Pengadministrasi BMN	Anggota
23.	Djumiaty	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
24.	Junaedi	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
25.	Supono	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
26.	Sumanto	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
27.	Warsa	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
28.	Okta Ria Yunita, S.St.Pi	Pengadministrasi BMN	Anggota
29.	Muhammad Bubud Alpadin, S.Kom	Pengadministrasi Data	Anggota
30.	Anggi Purwitasari, S.H., M.H	Pengadministrasi Ortala	Anggota
31.	Fenny Irene Supusepa, S.Sos	Pengadministrasi Layanan Perkantoran	Anggota
32.	Agus Andrianto, S.E	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
33.	Iwan Setiawan	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
34.	Isye Mardha Samalo, S.T	Sekretaris	Anggota
35.	Amalia Setiasari, A.Md	Sekretaris	Anggota
36.	Rohmat Hidayat	Pengemudi	Anggota
37.	Hadi Away	Pengemudi	Anggota

Kepala Pusat Riset Perikanan,  
  
**Yayan Hikmayani**

Lampiran Revisi Surat Tugas Kepala Pusat Riset Perikanan dengan Nomor :  
B.1869/BRSDM.3/KP440/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430  
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**SURAT TUGAS**

NOMOR : B.1869/BRSDM.3/KP.440/VIII/2023

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada Pusat Riset Perikanan.

**Dasar Hukum** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;  
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan  
3. Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nomor 983/SJ.3/OT.210/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023, hal Penyampaian Hasil Validasi Usulan Tim Kerja Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

**Memberi Tugas:**

**Kepada** : seluruh pegawai Pusat Riset Perikanan  
**Untuk** : 1. menjadi Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;  
2. memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dengan penuh tanggung jawab; dan  
3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Pusat Riset Perikanan.  
**Pembiayaan** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Riset Perikanan, Nomor DIPA-032.01.1.622081/2023, tanggal 30 November 2022.

Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Agustus 2023  
Kepala Pusat Riset Perikanan,



**Ditandatangani Secara Elektronik**

**Yayan Hikmayani**  
(NIP.196710041999032001)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PUSAT RISET PERIKANAN**

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
1	Dra. Endang Sriyati 19680104 199503 2 001 Pembina, IV/a Perencana Ahli Madya	Ketua				10
2	Sugesti Titik Maryati S.E. 19800309 201012 2 001 Penata Tk I, III/d Perencana Ahli Muda	Anggota				5
3	Drs. Nurbakti Listyanto 19800309 201012 2 001 Penata Tk I, III/d Perencana Ahli Muda	Anggota				5
4	Hadhi Nugroho, S.T 19800309 201012 2 001 Penata Tk I, III/d Perencana Ahli Muda	Anggota				5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
5	Noor Bimo Adhiyudanto, S.Si. 19800309 201012 2 001 Penata Tk I, III/d Perencana Ahli Muda	Anggota				5
6	Niken Winarsih, S.E 19800309 201012 2 001 Penata Tk I, III/d Perencana Ahli Muda	Anggota				5
7	Muhammad M. Mandailing, S.Pi., M.Si 19731114 200604 1 003 Pembina, IV/a Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota				5
8	Bambang Trias Yulianto, S.Fil., M.Si 19760701 201012 1 001 Pembina, IV/a Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota				5
9	Asmuil, S.Pi 19670710 200303 1 001 Penata Tk I, III/d Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota				5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
10	Susanna Purna Dewi Suharto, A.Md. 19920830 201503 2 003 Penata Muda Tk. I, III/a Pengelola Program dan Laporan	Anggota				5
11	Dra. Hera Rusida, MM 19690810 199601 2 001 Pembina Tk. I, IV/b Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya		Ketua			10
12	Mujib Nikmatuloh, S.E 19830927 201012 1 001 Penata Tk. I, III/d Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda		Anggota			5
13	Ir. Rasmawati Zainy 19660722 199903 2 001 Penata Tk. I, III/d Pengelola Barang dan Jasa Muda		Anggota			5
14	Ridha Afyanti, A.Md 19900915 201503 2 001 Pengatur Tk.I, II/d Pranata Keuangan APBN Terampil		Anggota			5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
15	Eli Nurcahyani, S.E 19781202 200604 2 007 Penata Muda Tk.I, III/b Penyusun Laporan Keuangan		Anggota			5
16	Dwi Ayu Purwanti, A.Md 19910604 201403 2 001 Penata Muda, III/a Pengelola Keuangan		Anggota			5
17	Muhammad Aris Nurcholis S.E., M.M 19770610 201012 1 001 Penata Tk. I, III/d Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran			Anggota		5
18	Suprapti 19720327 199203 2 001 Penata Muda Tk.I, II/b Pengadministrasi Keuangan		Anggota			5
19	Iwan Saputra 19780627 199803 1 001 Penata Muda, III/a Pengadministrasi Keuangan		Anggota			5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNB	
20	Galuh Laksita Swasti, S.Pi 19840225 201012 2 003 Penata Tk.I, III/d Perencana Ahli Muda			Ketua		10
21	Junaedi Abdilah, SE, M.AP. 19770604 200604 1 010 Pembina, IV/a Arsiparis Ahli Muda			Anggota		5
22	Arief Gunawan, S.Kom 19780507 200212 1 005 Penata Tk.I, III/d Pustakawan Ahli Muda			Anggota		5
23	Nasrul Rizal Azhar, S.Sos 19840308 201012 1 002 Penata, III/c Pustakawan Ahli Pertama			Anggota		5
24	Suyatno A.Md. 19830109 200801 1 007 Penata Muda Tk.I, III/b Pustakawan Penyelia			Anggota		5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNB	
25	Fristiya Heri Kartika, S.Kom 19760201 200901 1 004 Penata Muda, III/a Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan			Anggota	Anggota	10
26	Retno Sari Widyanti A.M.d. 19800307 200901 2 005 Penata Muda Tk.I, III/b Arsiparis Pelaksana Lanjutan			Anggota		5
27	Dwi Primawati, S.H 19880731 201012 2 002 Penata Tk.I, III/d Analisis SDM Aparatur		Anggota	Anggota		10
28	Suriani, S.E 19691219 200312 2 002 Penata, III/c Analisis SDM Aparatur			Anggota		5
29	Norma Tri Utami, A.Md. 19910804 201503 2 002 Penata Muda, III/a Pengelola Program dan Laporan			Anggota		5
30	Eka Sekarwati 19710208 199203 2 001 Penata Muda Tk.I, III/b Pengadministrasi Kepegawaian			Anggota		5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNB	
31	Marlea Oktaviani 19791020 200212 2 002 Penata Muda Tk.I, III/b Pengadministrasi Kepegawaian			Anggota		5
32	Diana Yulianti 19750719 200604 2 012 Penata Muda, III/a Pengadministrasi Kepegawaian			Anggota		5
33	I Gede Bayu Sedana, S.Kom 19780226 200604 1 001 Penata, III/c Analisis Data dan Informasi			Anggota	Anggota	10
34	Sandi Wibowo, S.T 19861023 200604 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran			Anggota	Anggota	10
35	Eri Sulistyowati 19710224 200003 2 002 Penata Muda Tk.I, III/b Pengadministrasi Bahan Evaluasi dan Pelaporan			Anggota		5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNB	
36	Mohamad Yamin 19660512 199003 1 004 Penata Muda Tk.I, III/b Pengadministrasi BMN			Anggota		5
37	Agung Pranajaya 19760815 200701 1 003 Pengatur Tk.I, II/d Pengadministrasi BMN		Anggota			5
38	Haerudin 19840627 200910 1 001 Pengatur Tk.I, II/d Pengadministrasi BMN			Anggota		5
39	Djumiaty 19680727 199003 2 004 Penata Muda Tk.I, III/b Pengadministrasi Keuangan			Anggota		5
40	Junaedi 19830729 200910 1 001 Pengatur Muda, II/a Pengadministrasi Persuratan			Anggota		5
41	Supono 19651031 199303 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b Teknisi Sarana dan Prasarana			Anggota		5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
42	Sumanto 19670115 199803 1 003 Penata Muda Tk.I, III/b Teknisi Sarana dan Prasarana			Anggota		5
43	Warsa 19670206 199903 1 007 Pengatur Muda, II/a Teknisi Sarana dan Prasarana			Anggota		5
44	Tri Handanari, S.Si, M.Sc 19750531 200212 2 001 Pembina Tk. I, IV/b Perencana Ahli Madya				Ketua	10
45	Ariani Andayani, S.Si, M.Sc 19761208 200212 2 003 Pembina, IV/a Analisis Kebijakan Ahli Madya				Anggota	5
46	Ria Faizah, S.Pi, M.Si 19790307 200212 2 003 Pembina, IV/a Analisis Kebijakan Ahli Madya				Anggota	5
47	Kamaluddin Kasim. S.Pi., M.Sc 19820517 200901 1 005 Penata Tk.I, III/d Analisis Kebijakan Ahli Muda				Anggota	5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
48	Aisyah, ST., M.Si 19791105 200502 2 001 Penata Tk.I, III/d Analisis Kebijakan Ahli Muda				Anggota	5
49	Kusnandi 19720725 200502 1 001 Pengatur Muda Tk. I, II/b Pengadministrasi Program dan Laporan				Anggota	5
50	Dwi Prasetyo, S.Pi. Pegadministrasi Kerja Sama				Anggota	5
51	Citra Sundawa, S.Kom Pengadministrasi Data				Anggota	5
52	Dedy Supriyadi, S.Kom Perencana Ahli Muda				Anggota	5
53	Natasa Kinski, S.Kom Pengadministrasi Anggaran	Anggota				5
54	Dani Candra Rukmana, S.Pi Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota				5
55	Ananda Listya, S.Pi Pengadministrasi Monev dan Pelaporan	Anggota				5
56	Chitra Restu Agustin, S.E Pengadministrasi Monev dan Pelaporan	Anggota				5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
57	Muhammad Aziz Baharsyah, S.Pi Analisis Kebijakan Muda	Anggota				5
58	Trisanto Wahyu Nugroho, S.E Pengadministrasi Keuangan		Anggota			5
59	Wawan Wahyu, A.Md Pengadministrasi Keuangan		Anggota			5
60	Susanto Pengadministrasi Keuangan		Anggota			5
61	Okta Ria Yunita, S.St.Pi Pengadministrasi BMN			Anggota		5
62	Muhammad Bubud Alpadin, S.Kom Pengadministrasi Data			Anggota		5
63	Anggi Purwitasari, S.H., M.H Pengadministrasi Ortala			Anggota		5
64	Fenny Irene Supusepa, S.Sos Pengadministrasi Layanan Perkantoran			Anggota		5
65	Agus Andrianto, S.E Pengadministrasi Persuratan			Anggota		5
66	Iwan Setiawan Pengadministrasi Persuratan			Anggota		5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja				Nilai Beban Kerja
		Program	Keuangan	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	
67	Isye Mardha Samalo, S.T Sekretaris			Anggota		5
68	Amalia Setiasari, A.Md Sekretaris			Anggota		5
69	Rohmat Hidayat Pengemudi			Anggota		5
70	Hadi Away Pengemudi			Anggota		5

Kepala Pusat Riset Perikanan,



Ditandatangani Secara Elektronik

Yayan Hikmayani  
(NIP.196710041999032001)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

**PEMBAGIAN TUGAS TIM KERJA PUSAT RISET PERIKANAN**

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
1	A. Program	1. Nilai PM SAKIP Pusat Riset Perikanan (nilai)	a. Koordinasi dan penyusunan Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja Pusat Riset Perikanan
		2. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Perikanan (Nilai)	b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kinerja Pusat Riset Perikanan
		3. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset Perikanan (nilai)	c. Koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, program, penganggaran, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyiapan bahan pimpinan
2	B. Keuangan	1. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Perikanan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Perikanan 2023	a. Koordinasi dan tindak lanjut penyelesaian terhadap nilai temuan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan
		2. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Pusat Riset Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	b. Koordinasi dan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Riset Perikanan
		3. Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan (nilai)	c. Koordinasi kinerja pengelolaan dan pelaksanaan anggaran lingkup Pusat Riset Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
3	C. Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum	1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan (indeks)	a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Perikanan
		2. Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Pusat Riset Perikanan (%)	b. Koordinasi dan monitoring penerapan sistem manajemen pengetahuan pada aplikasi manajemen pengetahuan yang ditunjuk
		3. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya Pusat Riset Perikanan (%)	c. Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan data, diseminasi dan publikasi, pengelolaan aset dan pengelolaan administrasi SDM Aparatur
4	D. Kemitraan dan Pengelolaan PNPB	1. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup Pusrisikan (kemitraan)	a. Koordinasi dan pelaksanaan layanan eksternal dalam kemitraan lingkup Pusat Riset Perikanan, termasuk dukungan SFV
		2. Nilai PNPB Saterk Lingkup Pusat Riset Perikanan	b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan PNPB Lingkup Pusat Riset Perikanan

Kepala Pusat Riset Perikanan,



Ditandatangani Secara Elektronik

**Yayan Hikmayani**  
 (NIP.196710041999032001)

**Catatan**

- uraian fungsi diselaraskan dengan indikator kinerja yang sesuai
- untuk uraian fungsi yang tidak ada kesesuaian dengan indikator kinerja, kolom indikator kinerja dikosongkan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF, BSSN